INFORMASI DATA
KABUPATEN NATUNA

PEMERINTAH KABUPATEN
NATUNA

2017

INFORMASI DATA
KABUPATEN NATUNA

PEMERINTAH KABUPATEN
NATUNA

2017

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Syukur Alhamdulillah kami ucapkan terimakasih kehadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan Buku Informasi Data Kabupaten Natuna Tahun 2017.

Informasi Data Kabupaten Natuna merupakan publikasi data yang akan diterbitkan setiap tahun yang dimulai sejak tahun 2017 oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna. Melalui data-data statistik yang tersaji, buku ini akan memberikan gambaran refresentatif mengenai kemajuan pembangunan dan perkembangan lainnya yang terjadi di Kabupaten Natuna. Bagi para pemangku kepentingan, kami harapkan data-data ini dipergunakan sebagai perencanaan, monitoring serta evaluasi kebijakan sedangkan bagi institusi pendidikan, swasta atau masyarakat umum, data-data tersebut juga bisa dimanfaatkan sebagai rujukan informasi.

Sebagai langkah kemajuan kiranya diwaktu mendatang kita dapat melakukan penyempurnaan. Dalam arti kualitas penyajian semakin baik serta selalu dapat tersedia kesinambungan dengan tetap melakukan konfirmasi dan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah/Instansi terkait sebagai narasumber. Kesinambungan penyajian diharapkan mampu memberikan gambaran bagi kita mengenai berbagai perubahan yang terjadi disetiap sektor kehidupan sehingga dapat diketahui arah dan sasaran pembangunan yang tepat di masa mendatang.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan Buku Informasi Data Kabupaten Natuna ini. Kami berharap Buku ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh setiap pihak yang berkepentingan.

Ranai, November 2017

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Natuna

RAJA DARMIKA, ST, MAP
NIP. 19741216 200003 1 003

PETA KABUPATEN NATUNA

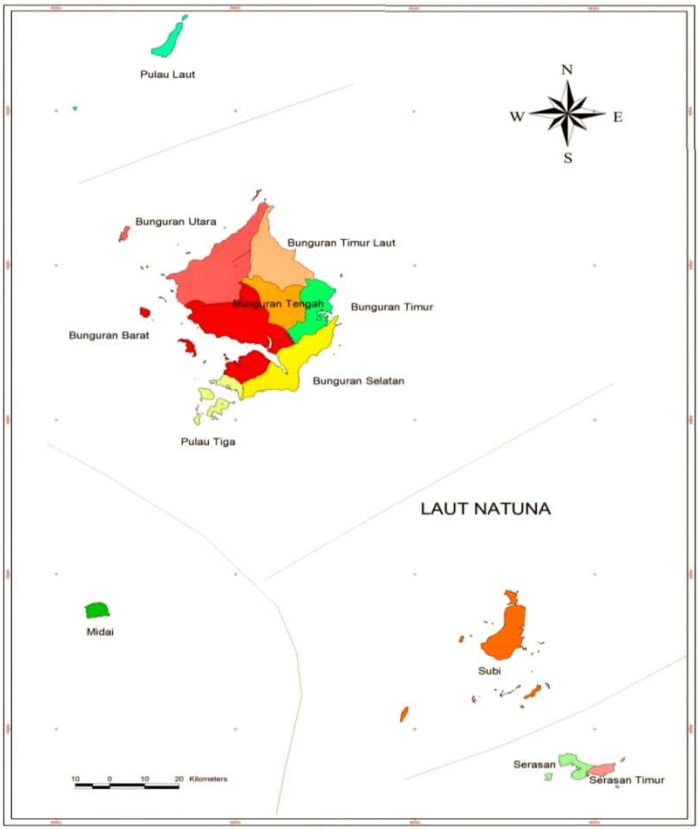

LAMBANG DAERAH KABUPATEN NATUNA

Lambang Daerah Kabupaten Natuna diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna, yaitu: Perda No. 1 Tahun 2001. Bentuk, lukisan, ukuran, warna lukisan Lambang Daerah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

1. **Tali Berpilin Tiga (berwarna kuning yang melingkari gambar lambang);** melambangkan etika falsafah adat yang selalu dijunjung.
2. **Sebuah Sampan Kolek berwarna hitam dan Linggi berwarna merah;** melambangkan penghidupan dan semangat kebaharian masyarakat Kabupaten Natuna.

3. **Laut Bergelombang Enam Lapis berwarna putih;** melambangkan administratif Kabupaten Natuna dengan kecamatan-kecamatan pada awal dibentuknya.
4. **Bintang Bersegi Lima berwarna kuning emas;** melambangkan kepercayaan masyarakat Kabupaten Natuna terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
5. **Daun Cengkeh Dua Belas Helai berwarna hijau daun dan Sepuluh Buah Bunga Cengkeh berwarna coklat muda;** melambangkan tanggal dan bulan terbentuknya Kabupaten Natuna.
6. **Setangkai Mayang Kelapa Sembilan Helai di kanan dan kiri tangkai berwarna kuning;** melambangkan tahun terbentuknya Kabupaten Natuna.
7. **Tapak Sirih berwarna kuning emas dan Sebilah Keris berwarna hitam dan warna Tangkai coklat;** melambangkan wadah pemersatu yang agung dan unsur budaya.
8. **Peta Indonesia berwarna putih dan Titik Api berwarna merah pada daerah peta Kabupaten Natuna;** melambangkan Wilayah Kabupaten Natuna yang terletak pada kawasan yang sangat strategis serta penghasil minyak dan gas.
9. **Lima Gerbang berwarna kuning;** melambangkan keluwesan masyarakat Natuna.
10. **Tulisan "NATUNA" berwarna merah darah;** melambangkan nama Kabupaten Natuna.

DAFTAR ISI

Sampul 1
Sampul Dalam 2
Kata Pengantar 3
Peta Kabupaten Natuna 5
Lambang Daerah Kabupaten Natuna 6
Daftar Isi 8
Daftar Tabel 12
BAB I 22
Data Umum Pemerintahan Kabupaten Natuna 22
1.1. Sejarah Natuna 22
1.2. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Natuna 27
1.3. Visi Dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna 37
1.4. Geografis 42
1.5. Luas Wilayah 45
1.6. Iklim 46
1.7. Kependudukan 50
1.8. Pemerintahan 56
1.9. Kepegawaian 56
BAB II 67
Ekonomi dan Keuangan 67
2.1. Ruang Lingkup 67
2.2. Konsep dan Definisi 67
2.3. Data Ekonomi dan Keuangan 71

2.4. Data Pengelolaan Aset Atau Barang Daerah 72
2.5. Data Pajak Daerah 73
2.6. Data Alokasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah 74
2.7. Data Realisasi Alokasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah 75
BAB III 76
Infrastruktur 76
3.1. Ruang Lingkup 76
3.2. Konsep dan Definisi 76
3.2.1 Konsep dan Definisi di Bidang Pekerjaan Umum.....76
3.2.2 Konsep dan Definisi di Bidang Pariwisata.....76
3.2.3 Konsep dan Definisi di Bidang Pos.....76
3.2.4 Konsep dan Definisi di Bidang Telekomunikasi dan Informatika 76
3.3. Data Dinas Pekerjaan Umum 80
3.4. Data Pariwisata 811
3.5. Data Pos 88
3.6. Data Telekomunikasi Dan Informatika 91
3.6.1 Tower BTS 76
3.6.2 Telepon Kabel 76
3.6.3 Warung Internet 76
BAB IV 96
Politik Hukum dan Keamanan 96
4.1. Ruang Lingkup 96

4.2. Konsep dan Definisi 96
4.3. Data Partai Politik di Kabupaten Natuna 98
4.4. Data Hukum 105
BAB V 106
Industri, Perdagangan, Lembaga Keuangan Koperasi, Usaha dan Investasi 106
5.1. Ruang Lingkup 106
5.2. Konsep dan Definisi 106
5.2.1 Konsep dan Definisi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 76
5.2.2 Konsep dan Definisi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 1076
5.2.3 Konsep dan Definisi Perbankan 1076
5.2.2 Konsep dan Definisi di Bidang Industri, Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional dan Koperasi 1076
5.3. Data BUMD 108
5.4. Data Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Nusa ..112
5.5. Data Industri Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional dan Koperasi 112
BAB VI 121
Sumber Daya Alam 121
6.1. Ruang Lingkup.....121
6.2. Konsep dan Definisi ..... **Error! Bookmark not defined.**
BAB VII 150
Sosial Budaya 150
7.1. Ruang Lingkup 150

7.2. Konsep dan Definisi 1511
7.3. Agama 154
7.4. Kesehatan 158
7.5. Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Pemuda dan Olahraga 162
BAB VIII 174
Insidensial 174
8.1. Ruang Lingkup 174
8.2. Konsep dan Definisi 174
8.3. Bencana Alam 178
8.4. Kebakaran Hutan 182
8.5. Pencurian dan Penyelundupan Kayu 183
8.6. Pencurian Ikan 184
8.7. Penyakit Menular 185
Sampul Belakang 187

DAFTAR TABEL

Tabel: 1.2.1 33

Pusat Pemerintahan di Wilayah Pulau Tujuh Zaman Hindia Belanda di Sedanau 33

Tabel: 1.2.2 35

Yang Menjabat Sebagai To – Cho (Wakil Belanda).....35

Tabel: 1.2.3 36

Nama – Nama Bupati yang Pernah Memimpin Kabupaten Natuna.36

Tabel: 1.4.1 44

Nama Gunung dan Ketinggiannya menurut Kecamatan di Kabupaten Natuna.....44

Tabel: 1.6.1 47

Curah Hujan dan Hari Hujan di Kabupaten Natuna Per Bulan 47

Tabel: 1.6.2 48

Suhu Udara Maksimum dan Minimum di Kabupaten Natuna Per Bulan 48

Tabel: 1.6.3 49

Suhu Udara Maksimum dan Minimum di Kabupaten Natuna Per Bulan 49

Tabel: 1.7.1 ..... **Error! Bookmark not defined.**51

Data Penyebaran Penduduk di Kabupaten Natuna Tahun 2016.....51

Tabel: 1.7.2 51

Data Penyebaran Penduduk di Kabupaten Natuna Semester I Tahun 2017.....51

Tabel: 1.8.1 57

Daftar Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Natuna 57

Tabel: 1.8.2 59

Banyaknya Desa/Kelurahan di Kabupaten Natuna 59

Tabel: 1.9.1 62

Banyaknya PNS Pemerintah Daerah menurut Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Natuna 62

Tabel: 1.9.2 63

Banyaknya PNS Pemerintah Daerah menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Natuna 63

Tabel: 1.9.3 63

Banyaknya Pegawai Tidak Tetap (PTT) menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Natuna Per Agustus 2017 63

Tabel: 1.9.4 63

Banyaknya Guru Tidak Tetap (GTT) menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Natuna Per Agustus 2017 63

Tabel: 1.9.5 63

Banyaknya Pegawai Tidak Tetap (PTT) Medis/Paramedis menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Natuna Per Agustus 2017 63

Tabel: 2.3.1 71

Dana Perimbangan 71

Tabel: 2.4.1 72

Pengelolaan Aset atau Barang Daerah 72

Tabel: 2.5.1 73

Pajak Daerah 73

Tabel: 2.6.1 74

Alokasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah menurut Program Kegiatan Tahun 2016 74

Tabel: 2.7.1 75

Realisasi Alokasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah menurut Program Kegiatan Tahun 2016 75

Tabel: 3.3.1 80

Daftar Panjang Jalan menurut Keadaan dan Status Jalan 80

Tabel: 3.5.1 88

Banyaknya Kantor Pos dan Kantor Pos Cabang Serta Karyawannya di Kabupaten Natuna 88

Tabel: 3.5.2 88

Surat Pos yang Dikirim dan Diterima menurut Jenis Surat di Kabupaten Natuna Tahun 2016 88

Tabel: 3.5.3 89

Paket Pos yang Dikirim dan Diterima menurut Jenis Paket di Kabupaten Natuna Tahun 2016 89

Tabel: 3.5.4 90

Jumlah dan Nilai Penjualan Benda Pos menurut Jenis Benda Pos di Kabupaten Natuna Tahun 2016 90

Tabel: 3.6.1 92

Data BTS di Kabupaten Natuna 92

Tabel: 4.3.1 98

Jumlah Anggota DPRD dirinci menurut Asal Partai 98

Tabel: 4.3.2 99

Jumlah Anggota DPRD Hasil Pemilu 2014 dirinci menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin 99

Tabel: 4.3.3 100

Anggota DPRD Kabupaten Natuna Periode 2014 – 2019 menurut Susunan Fraksi 100

Tabel: 4.3.4 101

Jumlah Anggota DPRD Dalam Tiap Komisi dirinci menurut Asal Fraksi 101

Tabel: 4.3.5 102

Anggota DPRD Kabupaten Natuna Periode 2014 – 2019 menurut Susunan Fraksi 102

Tabel: 4.3.6 103

Anggota DPRD Kabupaten Natuna Periode 2014 – 2019 menurut Susunan Komisi 103

Tabel: 4.3.7 104

Kegiatan dan Produk DPRD Kabupaten Natuna 104

Tabel: 4.4.1 105

Data Jumlah Produk Hukum yang dikeluarkan Tahun 2015 105

Tabel: 4.4.2 105

Data Jumlah Produk Hukum yang dikeluarkan Tahun 2016 105

Tabel: 5.3.1 110

Kondisi Pasar Ranai 110

Tabel: 5.3.2 112

Biaya Sewa Kios/Meja di Pasar Ranai 112

Tabel: 5.4.1 113

Produksi PDAM 113

Tabel: 5.4.2 114

Wilayah Pelayanan PDAM Per Januari Tahun 2016 113

Tabel: 5.5.1 114

Jumlah Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Natuna menurut Kecamatan 114

Tabel: 5.5.2 117

Jumlah Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Natuna menurut Kecamatan Tahun 2016 117

Tabel: 5.5.3 117

Jumlah Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Natuna menurut Kecamatan Tahun 2016 117

Tabel: 5.5.4 119

Banyaknya Perusahaan Industri menurut Klasifikasi Industri di Kabupaten Natuna 117

Tabel: 5.5.5 119

Jumlah Koperasi yang Aktif di Kabupaten Natuna menurut Jenis.. 119

Tabel: 5.5.6 120

Jumlah Koperasi di Kabupaten Natuna menurut Kondisi Yang Ada 120

Tabel: 6.2.1 124

Luas Tanam Bahan Makanan (Ha) menurut Komoditas di Kabupaten Natuna 124

Tabel: 6.2.2 125
Luas Panen Bahan Makanan (Ha) menurut Komoditas di Kabupaten Natuna 125
Tabel: 6.2.3 126
Produksi Bahan Makanan (Ton) menurut Komoditas di Kabupaten Natuna 126
Tabel: 6.2.4 127
Luas Tanam Sayuran (Ha) menurut Komoditas di Kabupaten Natuna 127
Tabel: 6.2.5 130
Luas Panen Sayuran (Ha) menurut Komoditas di Kabupaten Natuna 130
Tabel: 6.2.6 133
Produksi Sayuran (Ton) menurut Komoditas di Kabupaten Natuna 133
Tabel: 6.2.7 136
Luas Lahan Perkebunan (Ha) menurut Jenis di Kabupaten Natuna 136
Tabel: 6.2.8 137
Produksi Perkebunan (Ton) menurut Jenis di Kabupaten Natuna . 137
Tabel: 6.2.9 138
Jumlah Petani (KK) menurut Jenis di Kabupaten Natuna 138
Tabel: 6.2.10 139
Populasi Unggas menurut Jenis di Kabupaten Natuna Tahun 2016 139
Tabel: 6.2.11 143
Produksi Telur menurut Jenis di Kabupaten Natuna 143

Tabel: 6.2.12 143

Populasi Ternak menurut Jenis di Kabupaten Natuna Tahun 2016 143

Tabel: 6.2.13 143

Produksi Daging menurut Jenis di Kabupaten Natuna Tahun 2016 143

Tabel: 6.2.14 143

Produksi Budidaya Ikan laut menurut Kecamatan di Kabupaten Natuna 143

Tabel: 6.2.15 146

Produksi Budidaya Rumput Laut menurut Kecamatan di Kabupaten Natuna 146

Tabel: 6.2.16 147

Produksi Budidaya Ikan Air Tawar menurut Kecamatan di Kabupaten Natuna 147

Tabel: 6.2.17 147

Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) dan Armada Nelayan Tangkap Ikan Laut di Kabupaten Natuna 147

Tabel: 6.2.18 147

Produksi Hasil Tangkap Ikan Laut (Ton) menurut Jenis di Kabupaten Natuna 147

Tabel: 6.2.19 147

Data Produksi menurut Jenis dan Jumlah Alat Tangkap Ikan di Kabupaten Natuna Tahun 2016 147

Tabel: 7.3.1 155

Banyaknya Pemeluk Agama di Kabupaten Natuna menurut Kecamatan di Kabupaten Natuna 155

Tabel: 7.3.2 156

Banyaknya Tempat Ibadah dan Jenis Tempat Ibadah menurut Kecamatan di Kabupaten Natuna 156

Tabel: 7.3.3 157

Banyaknya Jemaah Haji menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Natuna 157

Tabel: 7.4.1 159

Banyaknya Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Apotek menurut Kecamatan di Kabupaten Natuna 159

Tabel: 7.4.2 160

Banyaknya Tenaga Kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Natuna 160

Tabel: 7.4.3 161

10 Jenis Penyakit Terbanyak di Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Natuna 161

Tabel: 7.5.1 163

Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Taman Kanak-Kanak (TK) menurut Kecamatan dan Status di Kabupaten Natuna 163

Tabel: 7.5.2 164

Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Dasar (SD) menurut Kecamatan dan Status di Kabupaten Natuna 164

Tabel: 7.5.3 165

Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) menurut Kecamatan dan Status di Kabupaten Natuna 165

Tabel: 7.5.4 169

Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) menurut Kecamatan dan Status di Kabupaten Natuna 169

Tabel: 7.5.5 170

Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menurut Kecamatan dan Status di Kabupaten Natuna 170

Tabel: 7.5.6 173

Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Raudhatul Athfal (RA) menurut Kecamatan dan Status di Kabupaten Natuna..... 170

Tabel: 7.5.7 173

Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) menurut Kecamatan dan Status di Kabupaten Natuna 170

Tabel: 7.5.8 173

Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) menurut Kecamatan dan Status di Kabupaten Natuna 170

Tabel: 7.5.9 173

Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Madrasah Aliyah (MA) menurut Kecamatan dan Status di Kabupaten Natuna..... 170

Tabel: 7.5.10 173

Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Pondok Pesantren menurut Kecamatan dan Status di Kabupaten Natuna..... 170

Tabel: 7.5.11 173

Jumlah Dosen dan Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) di Kabupaten Natuna 173

Tabel 8.3.1 179

Jumlah Kejadian Bencana dan Korban menurut Jenis di Kabupaten Natuna..... 179

Tabel 8.3.2 180

Jumlah Kejadian Bencana dan Dampaknya menurut Jenis di Kabupaten Natuna..... 180

Tabel 8.3.3 180

Jumlah Kejadian Bencana menurut Kecamatan dan Jenis di Kabupaten Natuna.....180

Tabel. 8.6.1 185

Jumlah Kasus Pencurian Ikan di Perairan Kabupaten Natuna.....185

Tabel. 8.7.1 186

Jumlah Kasus Penyakit Menular di Kabupaten Natuna.....186

BAB I
DATA UMUM PEMERINTAHAN KABUPATEN NATUNA

1.1. SEJARAH NATUNA

Pada abad ke-7 di belahan Barat Nusantara berdirilah kerajaan Maritim Sriwijaya dengan armada dagang yang menguasai jalur-jalur pelayaran sebelah Utara melalui Laut Cina Selatan, sebelah Barat melalui Selat Malaka dan sebelah Timur menguasai Laut Jawa.

Seorang pendeta Cina yang bernama I TSING pada tahun 671 M singgah di Kerajaan Sriwijaya memberitakan tentang perjalanannya ke Sriwijaya dalam bukunya: "Ta,t ang yu ku fa kao seng chouan dan nan hai ki ko usi ne chounan". (Footnok)

Diantaranya mengisahkan perjalanan laut I TSING di laut Cina Selatan telah singgah di Gugusan pulau-pulau, ada yang besar ada yang kecil. Pulau Besar dalam bahasanya disebut NAN TOA. Sedangkan "NAN" berarti Pulau, dan "TOA" berarti Besar, jadi artinya adalah "PULAU BESAR". Bermula dari sebutan "NAN TOA" inilah Sejarah Natuna berawal.

Setelah mengalami pasang surut kerajaan Sriwijaya mundur dan diganti oleh Kerajaan Majapahit di tanah Jawa. Seluruh kepulauan Nusantara takluk kepada kerajaan Majapahit dan tak luput pula kepulauan "PULAU BESAR" (Natuna sekarang). Pelaut-pelaut Majapahit dalam perjalanannya ke negeri Cina, Siam, Campa, Kamboja dan Annam (Vietnam) selalu menyinggahi "PULAU BESAR"

(Natuna sekarang) baik waktu pulang maupun pergi untuk keperluan menambah perbekalan air dan menunggu angin kencang mereda. Pada waktu itu Gugusan "PULAU BESAR" (Natuna sekarang) merupakan pulau yang berhutan lebat, banyak terdapat burung-burung Serindit, sejenis burung Bayan/Kakatua yang kecil. Oleh karena itulah "PULAU BESAR" (Natuna sekarang) berubah sebutan menjadi atau diganti nama menjadi "PULAU SERINDIT" (Natuna sekarang). Di pulau ini di beberapa tempat telah ada penghuninya antara lain Segeram, Seluan dan Setahas.

Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis, Putra Sultan Mahmud Syah I yaitu Sultan Allaudin Riayat Syah mendirikan Kerajaan Johor pada tahun 1530-1564 M merupakan kelanjutan dari Kerajaan Malaka. Pada masa pemerintahan beliau menempatkan atau mengangkat Datuk Kaya-Datuk Kaya sebagai wakilnya di "PULAU SERINDIT" (Natuna sekarang) yaitu:

1. Pulau-pulau Jemaja – Datok Amar Lela
2. Pulau-pulau Siantan – Datok Kaya Dewa Perkasa
3. Pulau Serindit (Kemudian Pulau Bunguran) – Datuk Kaya Indra Pahlawan
4. Pulau Sabda (Kemudian Tambelan) – Datuk Kaya Timbalan Siamah.

Pada masa pemerintahan Sultan Allaudin Riayat Syah III (Th. 1579-1655 M) memerintah di Johor, menurut kisahnya "ENGKU PATIMAH" yang sejak kecilnya mengidap sakit lumpuh dan tidak dapat berjalan. Oleh karena sultan merasa malu, maka sultan mengambil keputusan untuk membuang putrinya.

Secara diam-diam memang sudah dipersiapkan oleh pihak Istana Johor untuk kelengkapan keberangkatan yaitu 7 buah Pejajap (Perahu) dengan segala perlengkapannya, termasuk pengawal serta Inang dayangnya yang kesemuanya berjumlah 40 orang. Setelah persiapan rampung maka bertolaklah Sang Putri ENGKU FATIMAH dengan dibekali sebuah "MAHKOTA".

Setelah berhari mengarungi laut tanpa tujuan sampailah iring-iringan PUTRI ENGKU FATIMAH itu di pulau-pulau Siantan dan mereka mengambil kesempatan untuk beristirahat di pulau-pulau tersebut. Setelah selesai beristirahat mereka segera melanjutkan perjalanannya. Berhari-hari mereka mengarungi lautan dan sampailah iring-iringan PUTRI ENGKU FATIMAH di Tanjung Galing Pulau Sabang Mawang. Setelah melihat tempat untuk bermukim kurang memuaskan, mereka memutuskan untuk melanjutkan pelayaran ke Segeram.

Akhirnya iring-iringan PUTRI ENGKU FATIMAH terdampar di Kukup (Pulau Pasir) atau Jalik di Muara Sungai Segeram dan dari sini mudiklah penjajap-penjajap itu masuk ke Sungai Segeram dan berlabuh dekat suatu perkampungan. Mendengar ketibaan ENGKU FATIMAH Putri dari Sultan Johor di Pulau Srindit, maka "DATUK KAYA INDRA PAHLAWAN" berdatang sembah. Mengingat kedatangan sang putri membawa Mahkota Kerajaan yang memerintah dari Sultan Johor, maka dengan senang hati Datuk Kaya Indra Pahlawan menyerahkan kekuasaan Sang putri. Penyerahan itu diterima pula dengan senang hati oleh Putri Engku Fatimah serta mengajak rakyatnya membangun pemerintahan yang baru.

Sekitar tahun 1610 Masehi kedatangan Engku Fatimah di "PULAU SERINDIT" (Natuna sekarang) menurut sejarah, di Segeram ada seseorang yang di gelari "DEMANG MEGAT", yang dimana asal usul sebenarnya tidaklah diketahui dengan pasti. Alkisah menceritakan DEMANG MEGAT ini adalah seorang yang hanyut diatas rakit Buluh Betung atau Aur, dan rakit tersebut hanyut dibawa arus dan masuk ke Sungai Segeram. Di pinggiran Sungai Segeram banyak terdapat Batang Laning dan rakit tersebut sangkut diantara sela-sela kayu, dan dari situlah DEMANG MEGAT berjangkit-jangkit naik ke darat. Tubuh Megat berbulu didadanya dan tidak berpakaian sebagaimana layaknya.

Maka bertemulah rombongan Engku Fatimah dengan DEMANG MEGAT di Daerah Segeram tersebut. Pada pertemuan ini DEMANG MEGAT di ajak berbahasa Melayu tetapi ia tidak mengerti bahasa Melayu, rupanya DEMANG MEGAT hanya bisa berbahasa Siam dan beragama Budha. Kemudian DEMANG MEGAT di Islamkan oleh para pengikut Putri Engku Fatimah serta dikawinkan dengan Tengku Fatimah dengan tidak ada kemalangan apa-apa. Dalam upacara perkawinan itu Megat diberi gelar "ORANG KAYA SERINDIT DINA MAHKOTA". Adapun maksud dari kata DINA adalah berasal dari keadaan di Engku Fatimah sendiri yang merasa dirinya Hina Dina karena cacat lumpuh serta dibuang oleh ayahandanya Sultan ke PULAU SERINDIT yang jauh dengan dibekali sebuah "MAHKOTA KERAJAAN".

Maka sekitar tahun 1610 Masehi sejak kedatangan Engku Fatimah ke PULAU SERINDIT, dan setelah Megat bergelar "ORANG KAYA SERINDIT DINA MAHKOTA", mulailah PULAU SERINDIT

berpemerintahan sendiri dari Kerajaan Johor atas kuasa Engku Fatimah yang berpusat di Segeram. Megat memerintahkan rakyatnya membuat sebuah Mahligai tempat bersemayam Engku Fatimah. Mahligai dibuat dari bahan KAYU BUNGUR, maka dari nama KAYU BUNGUR inilah PULAU SERINDIT berganti nama menjadi "PULAU BUNGURAN".

Catatan: Menurut kamus Indonesia karangan WJS Poerwarda-minta bahwa KAYU BUNGUR adalah sejenis kayu yang bunganya berwarna ungu.

Berawal dari kebiasaan Pendeta Cina I TSING menyebut Pulau Besar dengan sebutan NAN TOA, "NAN" artinya Pulau, dan "TOA" artinya Besar, inilah kebiasaan berawal. Kebiasaan lidah orang Melayu, NAN TOA ini pun berubah sebutan menjadi "NATUNA" hingga sekarang.

RUMAH BANGUNAN LAMA PADA ZAMAN KEDATUAN DI-AIR MALI KELARIK (NATUNA) : TERMASUK CAGAR BUDAYA RUMAH KHAS MELAYU SUDAH RATUSAN TAHUN

1.2. SEJARAH TERBENTUKNYA KABUPATEN NATUNA

Kabupaten Natuna, adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia.

Tertulis dalam sejarah bahwa Kabupaten Natuna yang dahulunya bernama PULAU TUJUH sebelum bergabung dalam Kepulauan Riau, telah memerintahkan beberapa orang "Tokong Pulau" (Istilah yang diberikan kepada Datuk Kaya di Wilayah Pulau Tujuh). Julukan Tokong Pulau yang diberikan kepada Datuk Kaya di Pulau Tujuh mengibaratkan seorang pemimpin yang mengendalikan Pemerintah di wilayah terkecil yang sewaktu itu diberi hak oleh Sultan Riau sesuai dengan ketentuan "Yayasan Adat" yang sudah ada pada masa itu.

Dari keterangan yang diperoleh bahwa gelar yang diberikan di dalam pembagian Wilayah Datok Kaya Pulau Tujuh disebut sebagai berikut:

1. Wilayah Pulau Siantan: Pangeran Paku Negara dan Orang Kaya Dewa Perkasa
2. Wilayah Pulau Jemaja: Orang Kaya Maha Raja Desa dan Orang Kaya Lela Pahlawan
3. Wilayah Pulau Bunguran: Orang Kaya Dana Mahkota, dua orang Penghulu dan satu orang Amar Diraja
4. Wilayah Pulau Subi: Orang Kaya Indra Pahlawan dan Orang Kaya Indra Mahkota
5. Wilayah Pulau Serasan: Orang Kaya Raja Setia dan Orang Setia Raja
6. Wilayah Pulau Laut: Orang Kaya Tadbir Raja dan Penghulu Hamba Diraja

7. Wilayah Pulau Tambelan: Petinggi dan Orang Kaya Maharaja Lela Setia.

Orang-orang besar inilah yang pada zaman dahulu memerintah di wilayah Pulau Tujuh dengan masing-masing wilayah secara turun temurun dan sampai pada akhir kekuasaannya.

Oleh karena pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu masih memegang peranan "Zich Bemoelen Met" ikut mencampuri urusan pemerintahan yang menyangkut strateginya di Pulau Tujuh, maka penempatan kedudukan para Datuk Kaya diatur sedemikian rupa dengan menerapkan imperialisme yang bertujuan memecah belah persatuan dan kesatuan di wilayah Pulau Tujuh dan berpegang kepada "Devide et Impera" yang menguntungkan pihak Belanda.

Oleh karena itulah jauh sebelumnya sudah ada ditetapkan seorang penguasa Belanda bernama "Van Kerkhorff" pada tahun 1908 di Tanjung Belitung atau di Binjai di depan Pulau Sedanau. Pada masa itu hutan belukar di daerah Binjai dan sekitarnya sangat lebat dan penuh rawa-rawa yang merupakan tempat sarang nyamuk Malaria, maka tidak lama kemudian setelah tuan Kerkhorff terkena Malaria lalu pindah ke Sedanau dan tak lama kemudian meninggal dunia. Bermula ditempatkannya tuan Kerkhorff di Tanjung Belitung, mengingat laut di sekitar Tanjung Belitung sangat dalam dan terlindung dari serangan angin Utara.

Berkaitan dengan penempatan Van Kerkhorff mengingatkan kita kepada sejarah perjanjian "Treaty of London" Tanggal 17 Maret 1842 yang sudah dirintis sebelumnya oleh pemerintah Hindia Belanda bersama sekutunya Inggris yang membagi-bagi daerah

jajahannya untuk keuntungan mereka yang berkelanjutan di masa depan. Maka itu Inggris dan penguasa Belanda mencoba menanamkan pengaruhnya di Asia Tenggara, sampai kepada Kerajaan Riau – Johor mendekati masa suramnya, sehingga wilayah Riau bekas Kerajaan Riau diserahkan kepada Kolonial Belanda sedangkan Singapura dan Johor termasuk semenanjung Malaysia dikuasai Inggris.

Sultan Abdul Rahman Al Muazam Syah beserta Tengku Besar Umar langsung dimakzulkan oleh Kompeni Belanda pada tahun 1911 dan pada tahun 1913 dengan resmi Kesultanan Riau Lingga dibubarkan oleh penguasa Belanda dan bertepatan dengan itu berkumpullah seluruh Datuk Kaya yang ada di Riau di gedung tempat kediaman Residen (Gedung Daerah Sekarang) untuk menerima penjelasan-penjelasan dari penguasa Belanda diantaranya menyinggung tentang wilayah Pulau Tujuh mendapat perubahan pembagian wilayah yaitu:

1. Wilayah Datuk Kaya Pulau Bunguran dibagi dua wilayah yaitu Bunguran Barat dan Bunguran Timur sedangkan Pulau Panjang tersendiri.
2. Wilayah Datuk Kaya Jemaja di bagi dua, yaitu wilayah Datuk Kaya Ulu Maras dan Kuala Maras. Hasil dari pemecahan wilayah menunjukkan untuk memisah-misahkan puak-puak Melayu yang hidupnya sudah aman dan damai yang telah dibina oleh Datuk Kaya di Pulau Tujuh.

Awalnya Pulau Bunguran hanya satu buah pulau yang tidak pernah dimekarkan. Kemudian semenjak Kerajaan Riau Lingga dibubarkan oleh Belanda tepatnya tahun 1913, maka dikumpulkanlah seluruh Datuk Kaya oleh Belanda untuk tugas selanjutnya. Untuk Pulau Bunguran dibagi menjadi dua bagian yaitu Bunguran Barat dan Bunguran Timur. Kemudian setelah menjadi Kabupaten, Pulau Bunguran dimekarkan lagi menjadi Lima Bagian terdiri dari Bunguran Timur, Bunguran Timur Laut, Bunguran Tengah, Bunguran Barat dan Bunguran Utara.

Sejarah Kabupaten Natuna tidak dapat dipisahkan dari sejarah Kabupaten Kepulauan Riau, karena sebelum berdiri sendiri sebagai daerah otonomi, Kabupaten Natuna merupakan bahagian dan Wilayah Kepulauan Riau. Berdasarkan Surat Keputusan Delegasi Republik Indonesia, Provinsi Sumatera Tengah tanggal 18 Mei 1956 menggabungkan diri ke dalam Wilayah Republik Indonesia, dan Kepulauan Riau diberi status Daerah Otonomi Tingkat II yang dikepalai Bupati sebagai kepala daerah yang membawahi 4 (empat) kewedanaan sebagai berikut:

1. Kewedanaan Tanjungpinang, meliputi Kecamatan Bintan Selatan (termasuk Bintan Timur, Galang, Tanjungpinang Barat dan Tanjungpinang Timur).
2. Kewedanaan Karimun, meliputi wilayah Kecamatan Karimun, Kundur dan Moro.
3. Kewedanaan Lingga, meliputi wilayah Kecamatan Lingga, Singkep dan Senayang.

4. Kewedanaan Pulau Tujuh, meliputi wilayah Kecamatan Jemaja, Siantan, Midai, Serasan, Tembelan, Bunguran Barat dan Bunguran Timur.

Kewedanaan Pulau Tujuh yang membawahi Kecamatan Jemaja, Siantan, Midai, Serasan, Tambelan, Bunguran Barat dan Bunguran Timur beserta kewedanaan lainnya dihapus berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau tanggal 9 Agustus 1964 No. UP/247/5/1965. Berdasarkan ketetapan tersebut, terhitung 1 Januari 1966 semua daerah administratif kewedanaan dalam Kabupaten Kepulauan Riau dihapus.

Seiring dengan semangat Otonomi Daerah maka terbentuklah "KABUPATEN NATUNA" berdasarkan Undang-Undang No. 53 Tahun 1999, yang disahkan pada tanggal 12 Oktober 1999, dari hasil pemekaran Kabupaten Kepulauan Riau yang terdiri dari 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Barat, Jemaja, Siantan, Midai dan Serasan dan satu Kecamatan Pembantu Tebang Ladan.

Sedangkan Tambelan yang dahulunya masih tergabung dalam wilayah Pulau Tujuh harus memisahkan diri karena pembagian wilayah termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bintan.

Natuna merupakan kepulauan paling utara di selat Karimata. Di sebelah utara, Natuna berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja, di selatan berbatasan dengan Sumatera Selatan dan Jambi, di bagian barat dengan Singapura, Malaysia, Riau dan di bagian timur dengan Malaysia Timur dan Kalimantan Barat. Natuna berada pada jalur pelayaran internasional Hongkong, Jepang, Korea dan Taiwan.

Kabupaten ini terkenal dengan penghasil minyak dan gas. Cadangan minyak bumi Natuna diperkirakan mencapai 1.400.386.470 barel, sedangkan gas bumi 112.356.680.000 barel. Hewan khas Natuna adalah kekah.

Seiring dengan kewenangan otonomi daerah, Kabupaten Natuna kemudian melakukan pemekaran daerah kecamatan yang hingga tahun 2004 menjadi 10 kecamatan dengan penambahan, Kecamatan Pal Matak, Subi, Bunguran Utara dan Pulau Laut dengan jumlah kelurahan/desa sebanyak 53.

Hingga tahun 2007 ini Kabupaten Natuna telah memiliki 16 Kecamatan. 6 Kecamatan pemekaran baru itu diantaranya adalah Kecamatan Pulau Tiga, Bunguran Timur Laut, Bunguran Tengah, Siantan Selatan, Siantan Timur dan Jemaja Timur dengan total jumlah kelurahan/desa sebanyak 75.

Pada Tahun 2008 Kabupaten Natuna melakukan pemekaran dengan dibentuk Kabupaten Kepulauan Anambas, sehingga kecamatan menjadi 12 Kecamatan. Lalu hingga tahun 2015 dilakukan pemekaran desa dan kecamatan, sehingga saat ini Kabupaten Natuna terdiri dari 15 Kecamatan, 70 Desa, dan 6 Kelurahan.

Tabel: 1.2.1

Pusat Pemerintahan di Wilayah Pulau Tujuh

Zaman Hindia Belanda di Sedanau

KEPALA PEMERINTAHAN YANG PERNAH MENJABAT SEBAGAI CONTROLEUR, AMIR, POSTHOUDER DAN TO-CHODI WILAYAH NATUNA

Yang Menjabat Sebagai Amir

NO	N A M A	MASA JABATAN	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	RAJA MAHMOED (Wakil Soeltan)	1896	Amir Poelau Toejoe tinggal di Sedanau
2.	TENGKOE SAID (Wakil Soeltan)	-	Dari Singapoera tinggal di Sedanau semasa zaman Datoek Kaya Soean
3.	TENGKOE HAJI OESMAN	-	Amir di Sedanau dari Riau Pulau Penyengat
4.	RAJA YOENOES (Wakil Soeltan Riau)	-	-
5.	TENGKOE MAHMOED (Wakil Soeltan)	-	Amir Sedanau
6.	TENGKOE ALI (Wakil Soeltan)	-	Amir Sedanau
7.	RAJA HAJI DJA'AFAR (Wakil Sedanau)	-	Amir Sedanau
8.	RAJA HAJI IDRIS (Wakil Soeltan)	-	Amir Sedanau
9.	RAJA A. MADJID (Wakil Soeltan)	-	Amir Sedanau
10.	R. BOEDJANG	-	Amir Sedanau dari Soematra
11.	A. HAMID	1925-1933	Amir Sedanau dari Soematra

NO	N A M A	MASA JABATAN	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
12.	SYAHROEDIN	1933-1936	Amir Sedanau dari Mandailling
13.	M. DAHLAN	1936-1939	Amir Sedanau dari Palembang
14.	ENCIK MOEHD. APAN	-	Amir Sedanau (Dari Riau Penyengat Hanya 6 bulan)
15.	Rd. SOEARDIONO	1939-1944	Amir Sedanau (Dari Pulau Djawa)
16.	WAN ISMAIL	1944-1945	Amir Sedanau (Dari Boengoeran/Natoena)

Sumber: Kebudayaan dan Cagar Budaya Kab. Natuna, Penerbit Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Natuna Tahun 2010.

Tabel: 1.2.2
Yang Menjabat Sebagai To – Cho: (Wakil Belanda)
Sedanau: 01 Oktober 1944
STEL'M: WAN ISMAIL BIN WAN HAJI MOEHD. ISA
ONDERDISTRICT HOOFD - VAN BOENGORAN BARAT

NO	N A M A	MASA JABATAN	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	D. SOEWAART	1896	Controleur Wilayah Pulau Tujuh Berdomisili di Tanjung Pinang
2.	VAN KERKHOF (Geragebber)	-	Controleur Pulau Tujuh tinggal di Tanjung Belitung depan Sedanau
3.	J. RUSSER	1911 – 1914	Posthouder di Sedanau
4.	VAN HASTER	1915 – 1918	Controleur Poelau Toejoeh tinggal di Sedanau
5.	HAGA	1918 – 1920	Controleur Poelau Toejoeh tinggal di Sedanau
6.	REDUM	1920	Posthouder di Sedanau pindah ke Tarempa menjadi Controleur
7.	SYARIF	-	Posthouder Sedanau (dari Mandailling) tak lama pindah ke Serasan
8.	MANOESAMA	-	Posthouder di Sedanau (dari Ambon)
9.	J. MAMAHIT	-	Posthouder di Sedanau (dari Manado)
10.	WUHAMANU	-	Posthouder di Sedanau (dari Ambon)
11.	MOWA	-	Posthouder di Sedanau (dari Manado)
12.	MAMAHIT	-	Posthouder di Sedanau (dari Manado)

Sumber: Kebudayaan dan Cagar Budaya Kab. Natuna, Penerbit Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Natuna Tahun 2010.

Tabel: 1.2.3
Nama – Nama Bupati yang Pernah Memimpin Kabupaten Natuna

N A M A	MASA JABATAN	NOMOR SK
(1)	*(2)*	*(3)*
Drs. H. ANDI RIVAI SIREGAR	1999 – 2001	Nomor 131.24-1129 Tanggal 08 Oktober 1999
Drs. H.A. HAMID RIZAL	2001 – 2006	Nomor 13.24-023 Tanggal 29 Maret 2001
Drs. H. DAENG RUSNADI	2006 – 2011	Nomor 131.21-219 Tanggal 27 April 2006
Drs. H. RAJA AMIRULLAH, Apt	2010 – 2011	Nomor 131.21-219 Tanggal 25 Mei 2010
Drs. H. ILYAS SABLI, M.Si	2011 – 2016	Nomor 131.21-219 Tanggal 11 April 2011
Drs. H.A HAMID RIZAL, M.Si	2016 – 2021	Nomor 131.21-4687 Tanggal 02 Mei 2016

Sumber:Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016

1.3. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN NATUNA

Visi Kabupaten Natuna Tahun 2025 merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu 2005-2025. Visi Kabupaten Natuna Tahun 2025 menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi cita-cita bersama Pemerintah Daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat sipil. Pencapaian cita-cita ini akan selalu diwarnai berbagai peluang dan tantangan masa depan yang perlu diantisipasi dengan melaksanakan misi pembangunan Tahun 2005-2025. Misi pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 memperlihatkan tindakan yang akan dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai visi Kabupaten Natuna Tahun 2025. Hasil analisis terhadap kondisi umum dan pencapaian daerah dalam lima tahun terakhir, kajian terhadap bermacam permasalahan pokok dan isu-isu strategis daerah, serta pembahasan dengan pemangku kepentingan memberikan penegasan bahwa visi pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2025 adalah:

"MENJADI NATUNA MAS (MAKMUR, ADIL DAN SEJAHTERA)"

Sebagaimana kita ketahui, visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 adalah "Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur", dan visi pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah "Kepulauan Riau Berbudaya, Maju dan Sejahtera". Visi jangka

panjang daerah ini mempunyai 3 (tiga) unsur pokok yang menjadi sasaran dan cita-cita utama dalam pembangunan Kabupaten Natuna, yaitu: (a) makmur, (b) adil dan (c) sejahtera yang merupakan ciri-ciri dari masyarakat yang maju dan bermartabat sebagaimana yang didambakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Makmur, artinya perwujudan keadaan masyarakat yang terpenuhi segala kebutuhan lahir dan batin merata diseluruh wilayah, lapisan dan golongan masyarakat didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, berperadaban tinggi, professional serta berwawasan kedepan yang luas sehingga membentuk daerah yang mampu mengelola segenap potensinya dengan tetap mengedepankan pentinganya kerjasama dan sinergisitas.

Adil, artinya perwujudan keadaan masyarakat yang bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran, bebas dari gangguan dan rongrongan yang mengancam keselamatan lahir dan batin karena terjaminnya rasa keadilan dalam tata kehidupan. Keadilan juga diwujudkan dalam pemerataan pembangunan di seluruh wilayah dan segenap potensi serta mata pencaharian masyarakat Kabupaten Natuna. Pemerataan sarana dan prasarana pembangunan ke segenap wilayah adalah juga bagian dari aspek keadilan guna mendukung upaya mewujudkan keadilan pembangunan itu sendiri.

Sejahtera, artinya perwujudan keadaan masyarakat yang maju dan tercukupi seluruh kebutuhan hidupnya yang diukur dengan peningkatan kualitas dari berbagai aspek kehidupan. Kesejahteraan dicapai melalui keseimbangan antara jasmani dan

rohani serta lahir dan batin. Dalam konteks pembangunan, sejahtera yang akan diwujudkan adalah terciptanya kondisi ekonomi yang memberikan tingkat kelayakan hidup masyarakat Kabupaten Natuna dan kesejahteraan yang ditunjukkan oleh terpenuhinya layanan dasar masyarakat, sekurang-kurangnya layanan pendidikan dan kesehatan.

Misi pada dasarnya adalah merupakan upaya umum yang harus dilakukan agar visi yang telah ditetapkan di atas dapat dicapai pada kurun waktu tertentu. Dengan kata lain misi menunjukkan beberapa upaya utama pembangunan yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan semula. Dalam kerangka itu, misi juga diwujudkan untuk menjabarkan berbagai komitmen terhadap seluruh stakeholder pembangunan daerah dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang. Misi pembangunan Kabupaten Natuna untuk periode Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat beragama dan berbudaya yang selaras dan harmonis.
2. Mewujudkan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata serta mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Mewujudkan tatakelola kepemerintahan daerah yang baik, bersih dan akuntabel.
4. Mewujudkan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing.
5. Menyediakan prasarana dan sarana yang mendukung aktivitas ekonomi daerah.

6. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan.

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Natuna periode 2016-2021 adalah:

"MASYARAKAT NATUNA YANG CERDAS DAN MANDIRI DALAM KERANGKA KEIMANAN DAN BUDAYA TEMPATAN"

Penjabaran Visi Kabupaten Natuna Periode 2016-2021 tersebut adalah sebagai berikut:

Masyarakat yang cerdas, artinya masyarakat yang mampu berpikir kreatif dan inovatif bagi pengembangan dirinya, maupun pengembangan daerah.

Masyarakat yang mandiri, artinya mampu memberdayakan dan memenuhi kebutuhan dalam rangka melanjutkan kehidupannya yang lebih baik.

Kerangka keimanan, artinya bahwa kehidupan masyarakat Natuna senantiasa diwarnai oleh nilai-nilai keagamaan dan budi pekerti yang luhur.

Masyarakat berbudaya, artinya memiliki perilaku yang dijalankan sesuai dengan moral, norma-norma yang berlaku dimasyarakat, sesuai dengan perintah di setiap agama yang diyakini, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Misi pembangunan Kabupaten Natuna untuk periode Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan perekonomian berbasis sumber daya alam potensial daerah.
2. Memajukan sektor pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan anak didik.
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya masyarakat pesisir, nelayan dan petani.
4. Membuka keterisoliran daerah/desa melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi laut dan pembukaan jalan.
5. Meningkatkan keimanan dan mewujudkan kesadaran budaya melayu sebagai payung pembangunan daerah.
6. Mewujudkan integritas aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat.

1.4. GEOGRAFIS

Kondisi geografis merupakan dasar dari penataan lingkungan. Secara geografis, Kabupaten Natuna terletak pada $01^{0}16'00''$ – $07^{0}19'00''$ Lintang Utara dan $105^{0}00'00''$ - $110^{\circ}00'00''$ Bujur Timur. Kabupaten Natuna terletak di kepulauan paling utara di selat Karimata yang berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja di sebelah utara, Kabupaten Bintan (Provinsi Kepulauan Riau) di sebelah selatan, Malaysia Timur dan Kalimantan Barat di sebelah timur, Kabupaten Kepulauan Anambas (Provinsi Kepulauan Riau) di sebelah barat. Jarak Ibu Kota Kabupaten Natuna ke Ibukota Negara Tetangga, sebagai berikut:

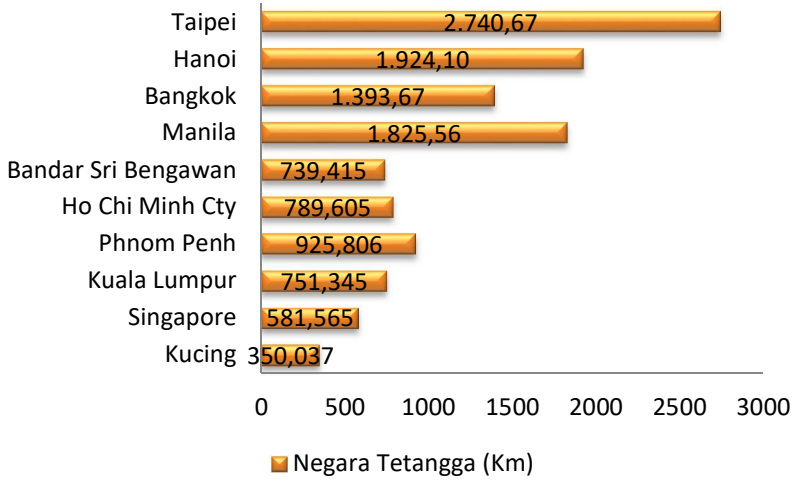

Sementara itu Jarak kota Ranai dengan kota-kota lainnya yang berada di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

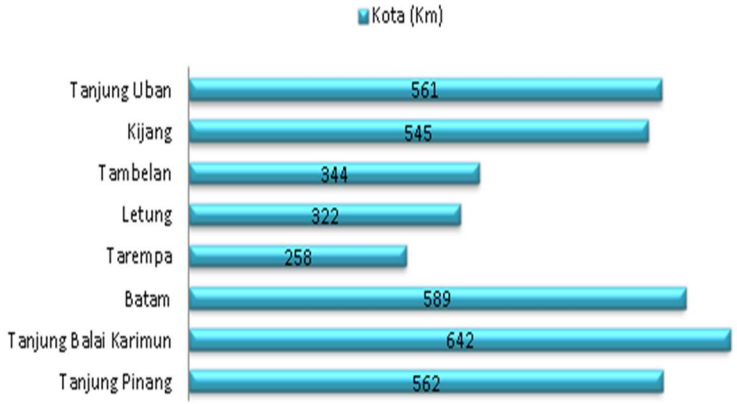

Dan Jarak Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan di Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

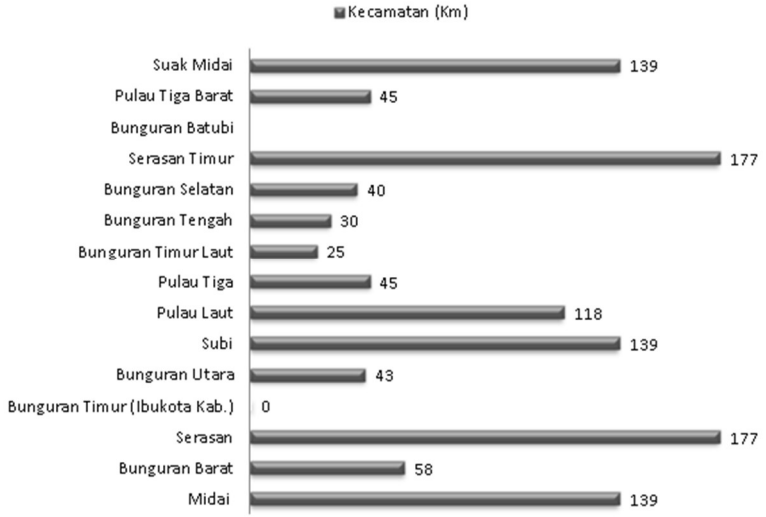

Dilihat dari topografinya, Kabupaten Natuna merupakan tanah berbukit dan bergunung batu. Dataran rendah dan landai banyak ditemukan di pinggir pantai. Ketinggian wilayah antar kecamatan cukup beragam, yaitu berkisar antara 3 sampai dengan 959 meter dari permukaan laut dengan kemiringan antara 2 sampai 5 meter.

Pada umumnya, struktur tanah terdiri atas tanah podsolik merah kuning dari batuan yang tanah dasarnya mempunyai bahan granit, dan alluvial serta tanah organosol dan gley humus.

Tabel: 1.4.1
Nama Gunung dan Ketinggiannya menurut Kecamatan di Kabupaten Natuna

Kecamatan		Nama Gunung	Tinggi (m)
(1)		*(2)*	*(3)*
01	Bunguran Timur	Gunung Ranai	959
02	Serasan	Gunung Punjang	443
		Gunung Pelawan Condong	405
		Gunung Kute	232
03	Bunguran Timur Laut	Gunung Bedung	474
		Gunung Segeram	328
		Gunung Ceruk	300

Sumber: Natuna Dalam Angka Kabupaten Natuna Tahun 2016

1.5. LUAS WILAYAH

Kabupaten Natuna secara administratif terdiri dari 15 kecamatan yaitu Kecamatan Midai, Suak Midai, Pulau Tiga, Pulau Tiga Barat, Pulau Laut, Bunguran Batubi, Bunguran Barat, Bunguran Utara, Bunguran Timur, Bunguran Timur Laut, Bunguran Tengah, Bunguran Selatan, Serasan, Serasan Timur, dan Subi.

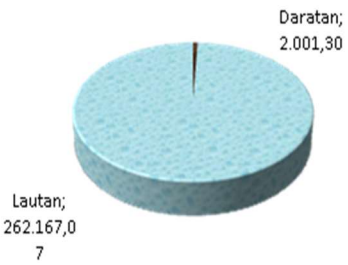

Kabupaten Natuna memiliki luas wilayah 264.198,37 Km^2, dan dimana sebagian besar wilayahnya terdiri dari perairan seluas 262.167,07 Km^2 dan sisanya daratan yang berbentuk kepulauan seluas 2.001,30 km^2.

Di Kabupaten Natuna terdapat 154 pulau, dengan 27 pulau (17,53%) yang berpenghuni dan sebagian besar pulau (127 pulau atau 82,47%) tidak berpenghuni. Dua pulau terbesar diantaranya adalah Pulau Bunguran dan Pulau Serasan, pulau – pulau yang ada dapat di kelompokkan dalam 2 gugus:

1. Gugus Pulau Natuna, terdiri dari pulau – pulau di Bunguran, Sedanau, Midai, Pulau Laut, dan Pulau Tiga
2. Gugus Pulau Serasan, terdiri dari pulau – pulau di Serasan, Subi Besar dan Subi Kecil

1.6. IKLIM

Kondisi iklim Natuna yang berada di dalam Provinsi Kepulauan Riau adalah beriklim tropis dan sangat dipengaruhi oleh perubahan arah angin. Musim kemarau biasanya terjadi pada Maret sampai Juli. Curah hujan rata-rata berkisar 9,6 milimeter dengan rata-rata kelembapan udara sekitar 86% dan temperatur berkisar antara 23^0C hingga 33,6˚C.

Pemanfaatan potensi laut yang dimiliki Kabupaten Natuna sangat tergantung oleh musim, sehingga sampai dengan saat ini potensi laut belum dapat dioptimalkan pemanfaatannya karena pengaruh musim yang dapat digunakan untuk menangkap ikan hanya selama enam bulan saja dalam satu tahun. Musim tersebut sangat berpengaruh terhadap usaha perikanan di Kabupaten Natuna, baik usaha penangkapan maupun usaha budidaya. Selebihnya, saat angin utara datang, laut di sekitar Natuna menjadi ganas dan para nelayan memilih berkebun sebagai cara untuk menyambung hidup.

Tabel: 1.6.1
Curah Hujan dan Hari Hujan di Kabupaten Natuna Per Bulan

Bulan		Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan
(1)		*(2)*	*(3)*
01	Januari	103,20	16
02	Februari	57,60	16
03	Maret	6,00	5
04	April	81,90	7
05	Mei	208,30	15
06	Juni	390,10	20
07	Juli	178,00	17
08	Agustus	68,20	10
09	September	419,60	23
10	Oktober	352,40	24
11	November	371,10	19
12	Desember	431,80	18
Rata-rata Tahun 2016		**222,35**	**15**
Rata-rata Tahun 2015		151,1	14

Sumber: Kabupaten Natuna Dalam Angka tahun 2017

Tabel: 1.6.2
Suhu Udara Maksimum dan Minimum di Kabupaten Natuna Per Bulan

Bulan		Maksimum (˚C)	Minimum (˚C)
(1)		*(2)*	*(3)*
01	Januari	33,00	23,50
02	Februari	33,00	24,00
03	Maret	33,70	21,40
04	April	34,20	23,20
05	Mei	34,60	24,40
06	Juni	32,60	23,40
07	Juli	34,40	22,20
08	Agustus	34,30	22,40
09	September	33,20	22,60
10	Oktober	33,90	22,80
11	November	34,00	23,40
12	Desember	32,40	23,20
Rata-rata tahun 2016		**33,6**	**23,0**
Rata-rata tahun 2015		33,3	22,3

Sumber: Kabupaten Natuna Dalam Angka tahun 2017

Tabel: 1.6.3
Suhu Udara Maksimum dan Minimum di Kabupaten Natuna Per Bulan

Bulan		Kelembapan Udara Relatif (%)	Kecepatan Angin (m/detik)
(1)		*(2)*	*(3)*
01	Januari	84,00	6,00
02	Februari	84,00	9,00
03	Maret	82,00	6,00
04	April	84,00	3,00
05	Mei	84,00	9,00
06	Juni	89,00	1,00
07	Juli	88,00	1,00
08	Agustus	85,00	2,00
09	September	90,00	1,00
10	Oktober	90,00	1,00
11	November	88,00	2,00
12	Desember	89,00	3,00
Rata-rata tahun 2016		**86,42**	**3,67**
Rata-rata tahun 2015		86,00	4,00

Sumber: Kabupaten Natuna Dalam Angka tahun 2017

1.7. KEPENDUDUKAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pengertian :

- Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

- Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

- Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga Negara Indonesia.

- Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Sebagai daerah kepulauan, penduduk Kabupaten Natuna menyebar di daerah-daerah pulau (kecamatan). Penyebaran penduduk di Kabupaten Natuna ke daerah-daerah kecamatan sebagaimana tergambar dalam data dibawah ini.

Tabel: 1.7.1
Data Penyebaran Penduduk di Kabupaten Natuna Tahun 2016

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Midai	1.719	1.771	3.490
2	Bunguran Barat	3.877	3.680	7.557
3	Serasan	2.503	2.411	4.914
4	Bunguran Timur	12.302	11.944	24.246
5	Bunguran Utara	2.095	2.023	4.118
6	Subi	1.398	1.388	2.786
7	Pulau Laut	1.107	1.054	2.161
8	Pulau Tiga	1.721	1.570	3.291
9	Bunguran Timur Laut	2.505	2.373	4.878
10	Bunguran Tengah	1.788	1.699	3.487
11	Bunguran Selatan	1.554	1.458	3.012
12	Serasan Timur	1.558	1.493	3.051
13	Bunguran Barat Batubi	1974	1837	3.811
14	Pulau Tiga Barat	960	926	1.886
15	Suak Midai	854	811	1.665
Jumlah 2016		**37.915**	**36.438**	**74.353**
Jumlah 2015		37.450	35.874	73.324

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna

Tabel: 1.7.2
Data Penyebaran Penduduk di Kabupaten Natuna
Semester I Tahun 2017

Kecamatan	Desa/Kel	LK	PR	Total
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Midai	Sabang barat	1.212	1.288	2.500
	Sebelat	258	254	512
	Air putih	233	230	463
Jumlah Per Kecamatan		**1.703**	**1.772**	**3.475**
Bunguran Barat	Sedanau	2.848	2.702	5.550
	Mekar Jaya	260	234	494
	Binjai	370	317	687
	Pian Tengah	218	205	423
	Selaut	155	179	334
Jumlah Per Kecamatan		**3.851**	**3.637**	**7.488**
Serasan	Serasan	996	977	1.973
	Kampung Hilir	230	231	461
	Batu Berian	330	339	669
	Tanjung Setelung	273	248	521
	Tanjung Balau	237	202	439
	Pangkalan	241	221	462
	Jermalik	218	189	407
Jumlah Per Kecamatan		**2.525**	**2.407**	**4.932**
Bunguran Batubi	Batubi Jaya	745	716	1.461
	Gunung Putri	599	556	1.155
	Sedarat Baru	266	232	498
	Sedanau Timur	193	184	377
	Semedang	176	162	338
Jumlah Per Kecamatan		**1.979**	**1.850**	**3.829**

Kecamatan	Desa/Kel	LK	PR	Total
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Bunguran Timur	Ranai	5.979	5.889	11.868
	Ranai Darat	1.421	1.405	2.826
	Bandarsyah	2.657	2.546	5.203
	Sungai Ulu	871	856	1.727
	Sepempang	963	915	1.878
	Batu Gajah	546	504	1.050
Jumlah Per Kecamatan		**12.437**	**12.115**	**24.552**
Bunguran Utara	Kelarik Utara	412	399	811
	Kelarik	469	461	930
	Kelarik Barat	218	207	425
	Kelarik Air Mali	335	320	655
	Teluk Buton	185	173	358
	Belakang Gunung	169	172	341
	Seluan Barat	120	131	251
	Gunung Durian	181	172	353
Jumlah Per Kecamatan		**2.089**	**2.035**	**4.124**
Subi	Subi	238	281	519
	Subi besar	156	147	303
	Meliah	182	157	339
	Pulau Panjang	270	238	508
	Terayak	193	186	379
	Pulau Kerdau	131	126	257
	Subi Besar Timur	132	140	272
	Meliah Selatan	95	113	208
Jumlah Per Kecamatan		**1.397**	**1.388**	**2.785**

Kecamatan	Desa/Kel	LK	PR	Total
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Pulau Laut	Tanjung Pala	404	360	764
	Air Payang	484	514	998
	Kadur	188	169	357
Jumlah Per Kecamatan		**1.076**	**1.043**	**2.119**
Pulau Tiga	Sabang Mawang	331	310	641
	Sededap	188	169	357
	Tanjung Batang	450	428	878
	Serantas	321	266	587
	Sabang Mawang Barat	229	216	445
	Teluk Labuh	208	180	388
Jumlah Per Kecamatan		**1.727**	**1.569**	**3.296**
Bunguran Timur Laut	Tanjung	462	431	893
	Ceruk	510	472	982
	Kelanga	493	473	966
	Pengadah	248	240	488
	Sebadai Hulu	198	179	377
	Limau Manis	375	405	780
	Selemam	214	178	392
Jumlah Per Kecamatan		**2.500**	**2.378**	**4.878**
Bunguran Tengah	Harapan Jaya	520	457	977
	Tapau	737	707	1.444
	Air Lengit	527	526	1.053
Jumlah Per Kecamatan		**1.784**	**1.690**	**3.474**

Kecamatan	Desa/Kel	LK	PR	Total
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Bunguran Selatan	Cemaga	443	445	888
	Cemaga Selatan	421	386	807
	Cemaga Utara	414	391	805
	Cemaga Tengah	263	207	470
Jumlah Per Kecamatan		**1.541**	**1.429**	**2.970**
Serasan Timur	Arung Ayam	467	471	938
	Air Nusa	426	407	833
	Air Ringau	343	317	660
	Payak	332	321	653
Jumlah Per Kecamatan		**1.568**	**1.516**	**3.084**
Pulau Tiga Barat	Pulau Tiga	383	392	775
	Tg. Kumbik Utara	225	208	433
	Setumuk	169	156	325
	Selading	206	186	392
Jumlah Per Kecamatan		**983**	**942**	**1.925**
Suak Midai	Air Kumpai	231	212	443
	Batu Belanak	300	282	582
	Gunung Jambat	320	311	631
Jumlah Per Kecamatan		**851**	**805**	**1.656**
Jumlah Semester I Tahun 2017		**38.011**	**36.576**	**74.587**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna

Dari data tersebut di atas terlihat bahwa penyebaran penduduk Kabupaten Natuna, di tiap-tiap kecamatan. Dan Kecamatan Bunguran Timur, Ranai sebagai pusat ibu kota Natuna, mendapat posisi penyebaran penduduk yang paling tinggi dibandingkan kecamatan penduduk lainnya dengan tingkat persentase yang cukup tinggi yaitu sekitar 32,91 % dari jumlah penduduk di Natuna. Pada urutan kedua, wilayah yang ramai penduduknya adalah di Kecamatan Bunguran Barat (Sedanau) yaitu sebanyak 7.488 dengan persentase 10%.

Sementara itu, perkembangan penduduk dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Jumlah penduduk Kabupaten Natuna di tahun 2016 sebanyak 74.353, di semester I tahun 2017 naik menjadi 74.587. Kenaikan sebanyak 234 atau 0,16 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

1.8. PEMERINTAHAN

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Menurut PP Nomor 18 Tahun 2016)

Sebagai tindak lanjut atas dikeluarkannya PP Nomor 18 Tahun 2016, berdampak pada perubahan Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Natuna berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016, melakukan perubahan Perangkat Daerah dengan nomenklatur sebagai berikut:

Tabel: 1.8.1
Daftar Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Natuna

No	SKPD	Klasifikasi
(1)	*(2)*	*(3)*
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Tipe A
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tipe A
3	Rumah Sakit Umum Daerah	Tipe C
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tipe B
5	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Tipe C
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	
7	Satuan Polisi Pamong Praja, Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Tipe B
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tipe C
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tipe B
10	Dinas Ketahanan Pangan	Tipe C
11	Dinas Lingkungan Hidup	Tipe B
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tipe B
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tipe C
14	Dinas Perhubungan	Tipe C
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tipe C
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tipe A
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Tipe C
18	Dinas Perikanan	Tipe B
19	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Tipe B
20	Dinas Pertanian	Tipe A

No	SKPD	Klasifikasi
(1)	*(2)*	*(3)*
21	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Tipe B
22	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Tipe A
23	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Tipe A
24	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Tipe C
25	Sekretariat Daerah	Tipe A
26	Sekretariat DPRD	Tipe C
27	Inspektorat	Tipe B
30	Badan Pengelola Perbatasan	
31	Kecamatan Bunguran Timur	
32	Kecamatan Bunguran Barat	
33	Kecamatan Bunguran Utara	
34	Kecamatan Pulau Laut	
35	Kecamatan Midai	
36	Kecamatan Serasan	
37	Kecamatan Subi	
38	Kecamatan Pulau Tiga	
39	Kecamatan Bunguran Tengah	
40	Kecamatan Bunguran Timur Laut	
41	Kecamatan Bunguran Selatan	
42	Kecamatan Serasan Timur	
43	Kecamatan Suak Midai	
44	Kecamatan Bunguran Batubi	
45	Kecamatan Pulau Tiga Barat	

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017

Kabupaten Natuna terdiri dari 15 kecamatan yang terbagi menjadi 6 kelurahan, 70 desa, 158 dusun, 280 RW, dan 698 RT. Kecamatan Bunguran Utara dan Kecamatan Subi memiliki jumlah desa terbanyak yaitu 8 desa sedangkan Kecamatan Midai memiliki jumlah desa paling sedikit yaitu 2 desa.

Tabel: 1.8.2
Banyaknya Desa/Kelurahan di Kabupaten Natuna

	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Dusun/ Lingkungan	RW	RT
	(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
01	Bunguran Timur	3	3	17	34	96
02	Bunguran Barat	1	4	9	19	55
03	Bunguran Utara	-	8	11	22	54
04	Bunguran Selatan	-	4	6	9	26
05	Bunguran Tengah	-	3	6	14	32
06	Bunguran Timur Laut	-	7	14	21	47
07	Bunguran Batubi	-	5	27	18	56
08	Midai	1	2	8	14	40
09	Suak Midai	-	3	5	10	24
10	Serasan	1	6	12	37	82
11	Serasan Timur	-	4	9	21	41
12	Subi	-	8	16	32	65
13	Pulau Tiga	-	6	9	17	38
14	Pulau Tiga Barat	-	4	6	5	18
15	Pulau Laut	-	3	3	7	24
	Jumlah	**6**	**70**	**158**	**280**	**698**

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017

1.9. KEPEGAWAIAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud dengan:

- Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah

- Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan

- Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan

- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Pada tahun 2016 jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS Otonom Daerah) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna sebanyak 3.080 orang. Dari jumlah tersebut 57,14% adalah pegawai laki-laki, dan 42,86% pegawai perempuan. Menurut tingkat pendidikannya 1,33% diantaranya berpendidikan SD; sedang yang berpendidikan SLTP sebanyak 1,36%; SLTA sebanyak 27,83%; D1 sebanyak 0,23%; D2 sebanyak 8,77%; D3 sebanyak 11,23%; D4 sebanyak 1,14%; S1 sebanyak 43,99%; S2 sebanyak 4,09%, dan S3 sebanyak 0,03%. Jika dilihat menurut golongan kepangkatannya berturut-turut golongan I (1,82%), golongan II (32,21%), golongan III (57,01%), dan golongan IV (8,96%).

Tabel: 1.9.1

Banyaknya PNS Pemerintah Daerah menurut Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Natuna

	Golongan Kepangkatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
	(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
01	Pembina Utama Madya (IV/d)	1	-	1
02	Pembina Utama Muda (IV/c)	20	2	22
03	Pembina Tk. I (IV/b)	31	5	36
04	Pembina (IV/a)	139	78	217
05	Penata Tk. I (III/d)	230	129	359
06	Penata (III/c)	191	144	335
07	Penata Muda Tk. I (III/b)	248	272	520
08	Penata Muda (III.a)	222	320	542
09	Pengatur Tk. I (II/d)	108	92	200
10	Pengatur (II/c)	282	196	478
11	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	131	45	176
12	Pengatur Muda (II/a)	103	35	138
13	Juru Tk. I (I/d)	10	1	11
14	Juru (I/c)	31	1	32
15	Juru Muda Tk. I (I/b)	8	-	8
16	Juru Muda (I/a)	5	-	5
Jumlah tahun 2016		**1.760**	**1.320**	**3.080**
Jumlah tahun 2015		1.788	1.346	3.134

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Natuna Tahun 2017

Tabel: 1.9.2

Banyaknya PNS Pemerintah Daerah menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Natuna

Golongan Kepangkatan		Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*
01	S-3	-	1	1
02	S-2	93	33	126
03	S-1	698	657	1.355
04	D-IV	26	9	35
05	D-III	119	227	346
06	D-II	151	119	270
07	D-I	5	2	7
08	SLTA	589	268	857
09	SLTP	39	3	42
10	SD	40	1	41
Jumlah tahun 2016		**1.760**	**1.320**	**3.080**
Jumlah tahun 2015		1.788	1.346	3.134

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Natuna Tahun 2017

Tabel: 1.9.3

Banyaknya Pegawai Tidak Tetap (PTT) menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Natuna Per Agustus 2017

Golongan Kepangkatan		Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*
01	S-3	-	-	-
02	S-2	1	-	1
03	S-1	105	100	205
04	D-IV	-	-	-
05	D-III	33	30	63
06	D-II	2	4	6
07	D-I	3	5	8
08	SLTA	667	347	1.014
09	SLTP	34	9	43
10	SD	33	2	35
Jumlah Per Agustus 2017		**878**	**497**	**1.375**

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Natuna Tahun 2017

Tabel: 1.9.4

Banyaknya Guru Tidak Tetap (GTT) menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Natuna Per Agustus 2017

Golongan Kepangkatan		Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*
01	S-3	-	-	-
02	S-2	-	-	-
03	S-1	91	186	277
04	D-IV	-	-	-
05	D-III	7	9	16
06	D-II	12	27	39
07	D-I	1	2	3
08	SLTA	39	50	89
09	SLTP	-	-	-
10	SD	-	-	-
Jumlah Per Agustus 2017		**150**	**274**	**424**

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Natuna Tahun 2017

Tabel: 1.9.5

Banyaknya Pegawai Tidak Tetap (PTT) Medis/Paramedis menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Natuna Per Agustus 2017

Golongan Kepangkatan		Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*
01	S-3	-	-	-
02	S-2	-	-	-
03	S-1	-	4	4
04	D-IV	-	1	1
05	D-III	20	71	91
06	D-II	-	-	-
07	D-I	-	-	-
08	SLTA	2	1	3
09	SLTP	-	-	-
10	SD	-	-	-
Jumlah Per Agustus 2017		**22**	**77**	**99**

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Natuna Tahun 2017

BAB II
EKONOMI DAN KEUANGAN

2.1. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penyajian data statistik tentang ekonomi dan keuangan meliputi: Dana perimbangan, pajak daerah, pengelolaan asset atau barang daerah, retribusi daerah, dan ringkasan APBD.

2.2. KONSEP DAN DEFINISI

Beberapa konsep dan definisi yang terdapat dalam pemaparan data tentang ekonomi dan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Dana perimbangan adalah sumber pembiayaan yang berasal dari bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam, serta dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

   Dana Perimbangan ini terdiri atas:

   - Dana Bagi Hasil
   - Dana Alokasi Umum
   - Dana Alokasi Khusus

a. Dana Bagi Hasil bersumber dari:
   1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
   2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
   3) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak
   4) Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.
   5) Kehutanan
   6) Pertambangan umum
   7) Perikanan
   8) Pertambangan minyak bumi
   9) Pertambangan gas bumi
   10) Pertambangan panas bumi.

b. Dana Alokasi Umum

   Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD.

   Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

   Jumlah Dana Alokasi Umum setiap tahun ditentukan berdasarkan Keputusan Presiden. Setiap provinsi/kabupaten/kota menerima DAU dengan besaran yang tidak sama, dan ini diatur secara mendetail dalam

Peraturan Pemerintah. Besaran DAU dihitung menggunakan rumus/formulasi statistik yang kompleks, antara lain dengan variabel jumlah penduduk dan luas wilayah yang ada di setiap masing-masing wilayah/daerah.

c. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

2. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

4. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,

termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Sedangkan Barang Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang berwujud atau perolehan lainnya yang sah antara lain:

a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak
c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2.3. DATA EKONOMI DAN KEUANGAN

Tabel: 2.3.1
Dana Perimbangan

Nama	Tahun	
	2015	2016
(1)	*(2)*	*(3)*
01 Jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK)		
1) Pagu	118,951,750,000	135,572,218,000
2) Realisasi	118,951,750,000	127,358,259,081
02 Jumlah Dana Alokasi Umum (DAU)		
1) Pagu	145,433,895,000	345,284,029,000
2) Realisasi	145,433,895,000	345,284,029,000
03 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak		
1) Pagu	233,874,484,000	131,471,853,738
2) Realisasi	174,668,607,850	173,928,276,327
04 Jumlah Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		
1) Pagu	508,811,418,346	390,333,350,648
2) Realisasi	270,330,247,932	387,347,548,801
05 Jumlah Dana Perimbangan (1+2+3+4)		
1) Pagu	1,007,071,547,346	1,115,235,747,893
2) Realisasi	709,384,500,782	1,150,287,118,997

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017

2.4. DATA PENGELOLAAN ASET ATAU BARANG DAERAH

Tabel: 2.4.1
Pengelolaan Aset atau Barang Daerah

Nama	2015	2016	Satuan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
Jumlah Aset	595,005	663,896	Unit
Aset Bergerak	588,360	656,511	unit
Aset Tak Bergerak	6,645	7,385	unit
Nilai Aset / Barang Daerah	3,284,481,323,035.33	3,246,005,375,604.00	Rp
Aset Bergerak	371,909,979,179.65	358,294,904,825.00	Rp
Aset Tak Bergerak	2,912,571,343,855.68	2,887,710,470,780.00	Rp
Nilai Penyusutan	958,990,223,891.49	1,015,095,225,634.84	Rp
Aset Bergerak	262,744,372,879.76	256,707,724,009.84	Rp
Aset Tak Bergerak	696,245,851,011.73	758,387,501,634.00	Rp

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017

2.5. DATA PAJAK DAERAH

Tabel: 2.5.1
Pajak Daerah

	Nama	2015 (Rp)	2016 (Rp)
	(1)	*(2)*	*(3)*
01	Pajak Hotel	125,489,628.00	251,978,772.00
02	Pajak Restoran	2,123,051,076.08	2,561,049,133.17
03	Pajak Hiburan	40,679,100.00	34,910,650,00
04	Pajak Reklame	6.114,976,133.00	113,092,465.00
05	Pajak Penerangan Jalalan	521,632,718.00	3.656.449.882,00
06	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batu Bara	521,632,718.00	1.248,875,165.00
07	Pajak Parkir	10,260,000.00	3,450,000.00
08	Pajak Air Tanah	3,630,000,00	6,025,000.00
09	Pajak Sarang Burung Walet	-	-
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	714,660,019.00	938,787,858.00
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTP)	631,049,528.00	362,402,372,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017

2.6. DATA ALOKASI ANGGARAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Tabel: 2.6.1
Alokasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah menurut Program Kegiatan Tahun 2016

	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Persentase (%)
	(1)	*(2)*	*(3)*
01	Pelayanan Umum	163,877,016,589.05	23.99
02	Ketertiban dan Ketentraman	7,892,066,000.00	1.16
03	Ekonomi	112,939,553,000.00	16.53
04	Lingkungan Hidup	9,732,867,420.00	1.42
05	Perumahan dan Fasilitas Umum	154,644,723,200.00	22.64
06	Kesehatan	127,401,922,862.00	18.65
07	Pariwisata dan Budaya	2,728,675,857.00	0.40
08	Pendidikan	97,914,544,360	14.33
09	Perlindungan Sosial	6,030,948,700.00	0.88
	JUMLAH 2016	**683,162,317,988.05**	**100.00**
	JUMLAH 2015	681,835,245,330.00	100.00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017

2.7. DATA REALISASI ALOKASI ANGGARAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Tabel: 2.7.1

Realisasi Alokasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah menurut Program Kegiatan Tahun 2016

	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Persentase (%)
	(1)	*(2)*	*(3)*
01	Pelayanan Umum	152,392,032,947.00	24.75
02	Ketertiban dan Ketentraman	7,753,196,526.00	1.26
03	Ekonomi	107,500,507,166.00	17.46
04	Lingkungan Hidup	8,125,973,190.00	1.32
05	Perumahan dan Fasilitas Umum	138,810,264,021.00	22.55
06	Kesehatan	105,477,548,066.00	17.13
07	Pariwisata dan Budaya	2,419,222,451.00	0.39
08	Pendidikan	88,041,667,781.66	14.30
09	Perlindungan Sosial	5,107,312,309.00	0.83
	JUMLAH 2016	**615,627,724,407.66**	**100.00**
	JUMLAH 2015	407,363,899,964.00	100.00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017

BAB III
INFRASTRUKTUR

3.1. RUANG LINGKUP

Adapun Ruang Lingkup penyajian data pada bab bidang Insfrastruktur ini akan memaparkan data yang berhubungan dengan:

1. Pekerjaan Umum,
2. Pariwisata,
3. Pos,
4. Telekomunikasi dan Informatika,

Adapun data yang di tampilkan pada pembahasan ini akan memaparkan data yang berkaitan dengan Kabupaten natuna.

Data Statistik Bidang Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, Informatika dan Komunikasi, Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Perumahan Rakyat

3.2. KONSEP DAN DEFINISI

3.2.1. Konsep dan Definisi di Bidang Pekerjaan Umum

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, pengertian :

- Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang

berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

- Jalan nasional adalah jalan yang dibangun untuk transportasi lintas nasional, sehingga langsung menjadi tanggung jawab Negara.
- Jalan provinsi adalah jalan yang menjadi penghubung antar kabupaten/kota menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi
- Jalan kabupaten adalah jalan yang tidak termasuk dalam jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

3.2.2. Konsep dan Definisi di Bidang Pariwisata

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pengertian:

- Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

- Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
- Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
- Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

3.2.3. Konsep dan Definisi di Bidang Pos

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, pengertian:

- Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum.
- Penyelenggara Pos adalah suatu badan usaha yang menyelenggarakan pos.
- Penyelenggaraan Pos adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan layanan pos

3.2.4. Konsep dan Definisi di Bidang Telekomunikasi dan Informatika

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, pengertian;

- Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
- Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
- Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
- Menara adalah bangunan khusus berupa bangun bangunan yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk kontruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
- Base Transiever Station yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat mobile telepon untuk melayani wilayah cakupan
- Serat Optik adalah sejenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.

3.3. DATA DINAS PEKERJAAN UMUM

Tabel: 3.3.1
Daftar Panjang Jalan menurut Keadaan dan Status Jalan
(Kilometer)

Keadaan	Status Jalan					
	Jalan Negara		Jalan Provinsi		Jalan Kab/Kota	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
Jenis Permukaan						
a. Diaspal	117,880	117,880	55,260	73,288	79,052	77,266
b. Beton Bertulang/ Semenisasi	0,000	0,000	0,000	15,540	95,915	89,823
c. Kerikil	0,000	0,000	0,000	12,020	245,504	204,517
d. Tanah	0,000	0,000	36,840	42,482	41,606	63,316
Jumlah	**117,880**	**117,880**	**92,100**	**143,330**	**464,077**	**434,922**
Kondisi Jalan						
a. Baik	111,986	110,88	40,32	60,256	275,022	172,219
b. Sedang	0,000	3,500	0,000	11,100	99,354	93,484
c. Rusak	5,894	2,300	51,78	15,270	35,088	77,021
d. Rusak Berat	0,000	1,200	0,000	56,702	54,613	91,514
Jumlah	**117,880**	**117,880**	**92,100**	**143,330**	**464,077**	**434,922**
Kelas Jalan						
a. Kelas I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
b. Kelas II	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
c. Kelas III A	117,88	117,88	0,000	0,000	0,000	0,000
d. Kelas III B	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
e. Kelas III C	0,000	0,000	92,100	73,288	174,967	167,089
f. Belum diklasifikasi	0,000	0,000	0,000	70,042	289,110	267,833
Jumlah	**117,880**	**117,880**	**92,100**	**143,330**	**464,077**	**434,922**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Natuna Tahun 2017

3.4. DATA PARIWISATA

Kabupaten Natuna lokasinya berada di ujung utara indonesia yang langsung berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja serta peraira menjadi rute pelayanan internasional. Traveler domestik belum banyak yang mencium keidahan daerah ini namun traveler asing sudah begitu familiar dengan tempat yang disebut – sebut sebagai cuilan tanah surga ini. Untuk itu berikut tempat wisata paling oke yang ada di Kabupaten Natuna:

Berdasarkan Keputusan Bupati Natuna Nomor 193 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Natuna (TP3N) bahwa lokasi prioritas di Kabupaten Natuna adalah;

Lokasi Prioritas Pertama;

1. Pulau Senua Kecamatan Bunguran Timur
2. Teluk Depeh Kecamatan Bunguran Selatan
3. Lokasi Hutan Bakau (Mangrove) di Pering – Sebala Kecamatan Bunguran Timur
4. Lokasi Hutan Bakau (Mangrove) Semitan Kecamatan Bunguran Timur Laut
5. Pantai Teluk Selahang/Pantai Tanjung Kecamatan Bunguran Timur Laut
6. Area Pantai Batu Kasah Kecamatan Bunguran Selatan

Lokasi Prioritas Kedua;

1. Pulau Kemudi dan Pulau Jantai Kecamatan Bunguran Selatan
2. Air Terjun Gunung Ranai Kecamatan Bunguran Timur
3. Pantai Sisi Kecamatan Serasan
4. Pulau Setai, Pulau Setanau Kecamatan Pulau Tiga
5. Pantai Pasir Marus Sedanau Kecamatan Bunguran Barat.

Keterangan:

1. Pulau Senua

   Pulau Senua berada di wilayah administratif Kecamatan Bunguran Timur, tepatnya berada di seberang Desa Sepempang. Kawasan ini adalah tempat yang sempurna bagi traveler yang mencari lanskap alam pantai yang eksotis dengan alam bawah laut yang magis.

2. Teluk Depeh

   Pantai Teluk Depeh berada di desa Cemaga Selatan dan berjarak 15 kilometer dari jalan raya untuk dapat sampai kesana. Pantai ini menawarkan kecantikan pemandangan alamnya, air lautnya bening bak kaca dan tampak berkilau-kilau ketika cahaya matahari jatuh menerpa.

3. Hutan Bakau (Mangrove) di Pering – Sebala

   Berjarak sekitar 5 kilometer dari bandara Ranai dan berlokasi di Pering, Ranai, Kecamatan Bunguran Timur. Selain menjadi objek wisata hutan bakau ini juga menjadi sarana agar tidak

terjadi abrasi dan dapat melestarikan kehidupan yang ada didalamnya.

4. Hutan Bakau (Mangrove) Semitan

   Berjarak sekitar 30 kilometer dari kota Ranai dan berlokasi di Desa Pengadah Kecamatan Bunguran Timur Laut. Sama halnya dengan hutan bakau (mangrove) di Pering, objek wisata hutan bakau ini juga menjadi sarana agar tidak terjadi abrasi dan dapat melestarikan kehidupan yang ada didalamnya.

5. Pantai Teluk Selahang/Pantai Tanjung

   Membaur dengan warga asli Natuna bisa dilakukan traveler saat berkunjung ke Pantai Tanjung. Pantai ini adalah salah satu tujuan wisata favorit warga Natuna. Pada hari libur bibir pantai ini akan dipenuhi oleh pengunjung yang rata-rata adalah warga sekitar. Pantai Tanjung terletak di desa Tanjung, kecamatan Bunguran Timur Laut dan bisa ditempuh dengan berkendara selama 20 menit dari kota Ranai.

6. Area Pantai Batu Kasah

   Pantai yang punya nama lain Pantai Cemaga ini disebut-sebut sebagai salah satu pantai terbaik yang dimiliki kabupaten ini. Pantainya bisa traveler temukan di kecamatan Bunguran Selatan. Sekeliling pantai ini ditumbuhi banyak pohon kelapa serta serakan batuan granit membuat gambaran pulau tropis nampak sempurna. Pantai Batu Kasah juga dianugerahi

dengan bibir pantai yang panjang hingga ±5 km, dengan pasirnya yang putih dan air lautnya yang jernih membuat siapa saja yang berkunjung ke sana bakal langsung kepincut dengan pesonanya.

7. Pulau Kemudi dan Pulau Jantai

   Pulau Kemudi bersebelahan dengan Pulau Jantai merupakan bagian dari pulau-pulau kecil indah yang ada di sebelah timur Desa Cemaga Kecamatan Bunguran Selatan. Hanya membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit dengan berjalan santai untu mengelilingi Pulau Kemudi. Keindahan bawah laut, jernihnya air dan kaya dengan ekosistem laut, menjadi salah satu daya tarik wisata di kedua pulau ini.

8. Air Terjun Gunung Ranai

   Meski suguhan utama traveling ke Natuna adalah wisata bahari namun daratan kabupaten Natuna yang berupa perbukitan juga menyimpan wisata alam yang tak kalah menarik lewat Air Terjun Gunung Ranai. Membelah hutan dan menaiki perbukitan melalui jalan setapak nan terjal menjadi rute wajib yang harus dilahap setiap traveler. Hadiahnya adalah pemandangan alam yang perawan serta air terjun alami yang punya air bersih siap menyambut traveler.

9. Pantai Sisi

   Pantai Sisi memiliki panjang sekitar 7 kilometer dengan pasir putihnya yang berkilauan dan desiran ombak yang menggulung. Pantai ini menjadi tempat favorit untuk tamasya dan cocok untuk olahraga surfing, serta menikmati pemandangan sunset di sore hari. Pantai Sisi pernah dinobatkan sebagai salah satu pantai alami yang terbaik di dunia (Best Undiscovered Beach) versi Majalah Islands, edisi September 2006.

10. Pulau Setai, Pulau Setanau

    Pulau Setai letaknya berada dalam kawasan Kecamatan Pulau Tiga dan bersebelahan dengan Pulau Setanau. Pulau Setai hanya memiliki bibir pantai berkisar 5 meter. Pulau Setai dan Pulau Setanau juga menjadi destinasi favorit para wisatawan, karena pulau ini menyimpan keeksotisan alam bawah lautnya, dimana para wisatawan dapat melakukan aktivitas snorkeling dan diving.

11. Pantai Pasir Marus Sedanau

    Pantai Pasir Marus merupakan obyek wisata utama di Pulau Sedanau kecamatan Bunguran Barat. Garis Pantai ini sepanjang 500 meter, mempunyai pasir putih yang bersih, airnya yang jernih, dan udara pantai yang segar.

Disamping itu, sejumlah daerah tujuan wisata lainnya yang menarik dikunjungi wisatawan domestik yaitu;

1. Batu Sindu

   Batu Sindu adalah nama kawasan pantai yang banyak dipenuhi dengan batu-batuan granit dengan berbagai bentuk dan ukuran, dari yang kecil hingga sangat besar. Selain keanekaragaman ukuran dan penyebaran batu yang memiliki daya tarik tersendiri, Batu Sindu terkenal dengan legenda (cerita rakyat) yang menyertai di dalamnya.

   Menikmati kawasan Batu Sindu paling menarik adalah lewat menara mercusuar yang ada di sekitar lokasi. Batu Sindu ini bisa kita temukan di kecamatan Bunguran Timur.

2. Alif Stone Park

   Kabupaten Natuna memiliki banyak pantai dengan karakteristik yang serupa yaitu dikelilingi oleh hamparan batu granit. Pemandangan paling sempurna antara pantai dan batuan granit bisa dilihat di Alif Stone Park yang disebut-sebut menjadi ikon paling populer di Natuna. Pantai ini letaknya berada di dekat Kota Ranai yang menjadi ibukota kabupaten. Sesuai dengan namanya Alif Stone Park merupakan taman berbatu yang berada di tepi pantai Desa Sepempeng. Tempat wisata ini adalah perpaduan antara pantai pasir putih, air laut yang jernih serta gugusan batuan granit yang mempercantik kawasan. Fasilitas wisatawan yang ada di tempat ini adalah jembatan kayu yang menghubungkan antar batu-batu besar

sehingga pengunjung bisa berkeliling di area sekitar taman batu ini.

3. Masjid Agung

Masjid Agung merupakan salah satu bangunan Maskot Kabupaten Natuna. Masjid Agung Natuna adalah masjid megah dan terbesar yang ada di Kabupaten Natuna Masjid ini dibangun tahun 2007. Lokasi keberadaannya cukup mudah ditemukan karena terletak di kompleks Gerbang Utaraku yang menjadi kawasan pusat pemerintahan kedua setelah komplek perkantoran di Batu Sisir Bukit Arai Ranai.

3.5. DATA POS

Penyelenggara Pos telah menunjukkan peran yang penting dan strategis dalam menunjang kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka wawasan nusantara dan memantapkan serta meningkatkan hubungan antar bangsa.

Tabel: 3.5.1
Banyaknya Kantor Pos dan Kantor Pos Cabang Serta Karyawannya di Kabupaten Natuna

Kantor Pos	Kode Pos	Karyawan	Alamat
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
Serasan	29781	1 Orang	Jl. Mesjid Serasan
Sedanau	29782	2 Orang	Jl. Panglima Hujan No. 17 Bunguran Barat
Ranai	29783	3 Orang	Jl. Datuk Wan Kaya Benteng Bunguran Timur
Midai	29784	1 Orang	Jl. Merdeka No. 61 Midai

Sumber: Kantor Pos Ranai Kabupaten Natuna Tahun 2017

Tabel: 3.5.2

Surat Pos yang Dikirim dan Diterima menurut Jenis Surat di Kabupaten Natuna Tahun 2016

	Jenis Surat	Dikirim	Diterima
	(1)	*(2)*	*(3)*
01	Surat biasa	215	6,062
02	Surat kilat khusus	1,920	16,548
03	Surat kilat	-	-
	Jumlah	**2,135**	**22,610**

Sumber: Kantor Pos Ranai Kabupaten Natuna Tahun 2017

Tabel: 3.5.3

Paket Pos yang Dikirim dan Diterima menurut Jenis Paket di Kabupaten Natuna Tahun 2016

	Jenis Paket	Dikirim	Diterima
	(1)	*(2)*	*(3)*
01	Paket biasa	456	1,248
02	Paket laut-udara	516	672
	Jumlah	**972**	**1,920**

Sumber: Kantor Pos Ranai Kabupaten Natuna Tahun 2017

Tabel: 3.5.4
Jumlah dan Nilai Penjualan Benda Pos menurut Jenis Benda Pos di Kabupaten Natuna Tahun 2016

	Jenis Benda Pos	Jumlah	Nilai (Rp)
	(1)	*(2)*	*(3)*
01	Perangko	76	114,000
02	Materai	90,000	540,000,000
03	Amplop	-	-
04	Kartu Pos	-	-
05	Wesel	2,268	-
06	Lainnya	-	-
	Jumlah	**92,344**	**540,114,000**

Sumber: Kantor Pos Ranai Kabupaten Natuna Tahun 2017

Dengan kondisi Kabupaten Natuna yang berkepulauan, tentu keberadaan 6 kantor penyelenggaraan pos tersebut, masih dirasakan sangat kurang. Oleh karenanya dibutuhkan penambahan penyelenggaraan pos untuk setiap kecamatan, mengingat perkembangan penduduk yang dari waktu ke waktu kian bertambah yang dibarengi dengan semakin meningkatnya aktivitas.

3.6. DATA TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3.6.1. Tower BTS

Berdasarkan hasil rekapitulasi data pada semester I Tahun 2017, Jumlah Menara Telekomunikasi (tower bst) yang ada di Kabupaten Natuna berjumlah 65 buah, yang terdiri atas telkomsel 35, indosat 11, xl 6 dan 14 buah tower bst dari program kewajiban pelayanan universal/universal service obligation (KPU/SO) dari Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi Indonesia (BP3TI) Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Tabel: 3.6.1
Data BTS di Kabupaten Natuna

TAHUN	Operator			Program	TOTAL
	TELKOMSEL	INDOSAT	XL	USO	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
2003	1	3	-	-	4
2004	1	2	-	-	3
2005	5	-	-	-	5
2006	3	-	-	-	3
2007	-	5	2	-	7
2008	3	1	4	-	8
2009	1	-	-	-	1
2010	3	-	-	-	3
2011	1	-	-	-	1
2012	-	-	-	10	10
2013	6	-	-	4	10
2014	1	-	-	-	1
2015	1	-	-	-	1
2016	4	-	-	-	5
2017	5	-	-	-	5

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Tahun 2017

Ketersediaan dan kelancaran arus telekomunikasi akan sangat membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (government to citizen) dan kegiatan intra pemerintah (government to government). Bagi masyarakat dan dunia usaha ketersediaan layanan telekomunikasi yang baik akan sangat menunjang dalam melaksanakan aktivitasnya selain untuk memudahkan berkomunikasi, telekomunikasi juga sangat membantu dalam menunjang aktivitas ekonomi masyarakat, dimana telekomunikasi disini berperan sebagai e-commerce. Sementara itu bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, ketersediaan telekomunikasi akan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini selaras dengan tujuan diselenggarakannya telekomunikasi yaitu untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintah, serta meningkatkan hubungan antar bangsa.

Seiring dengan perkembangan telekomunikasi di Kabupaten Natuna, peningkatan kualitas layanan jaringan semakin dirasakan. Sebelumnya rata-rata sinyal hanya 2G/3G maka di tahun 2017 meningkat menjadi 3G/4G.

Peran swasta yang masih terbatas dalam membangun jaringan telekomunikasi, membuat Pemerintah Kabupaten Natuna kemudian meminta bantuan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui BP3TI untuk mengatasi daerah-daerah blankspot area. Sehingga pada tahun 2012 dibantulah 14 tower bts di Kabupaten Natuna melalui program

KPU/USO. BP3TI juga memberikan bantuan tower bts KPU/USO untuk tahun 2017/2018.

3.6.2. Telepon Kabel

Selain telepon seluler, sarana telekomunikasi lainnya yang ada di Kabupaten Natuna yaitu telepon kabel. Telepon kabel merupakan sarana telekomunikasi yang diselenggarakan oleh PT. Telekomunikasi Indoensia (PT. Telkom), yang kehadirannya di Natuna sudah ada sejak tahun 1980-an. Dimana pada waktu itu untuk sarana komunikasi jarak jauh masih mempergunakan satelit dan telegram.

Meskipun keberadaannya di Natuna sudah ada bahkan sebelum Kabupaten Natuna terbentuk, namun pertumbuhan jaringan telkom masih sangat rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari jaringan telepon yang terpasang. Dimana untuk jaringan, sampai saat ini baru terpusat di ibu kota Ranai. Berdasarkan data dari Telkom Ranai, Sementara pada tahun 2016 sampai bulan Juni jumlah pelanggan tersambung hanya 543 sambungan telepon untuk perkantoran dan rumah tangga dengan 85 pelanggan speedy dan pada awal Tahun 2017, jumlah pelanggan telkom, pelanggan telepon sebanyak 545 pelanggan dan speedy sebanyak 62 pelanggan.

Hal ini sangat jauh bila dibandingkan dengan akta Rumah Tangga/Perkantoran yang ada. Data Statistik Tahun 2016 menunjukkan terdapat 6.549 Rumah Tangga yang ada di wilayah Bunguran Timur sebagai pusat ibu kota Ranai . Bila dipersentasenya berarti baru terdapat 9% rumah tangga yang terlayani telepon.

Sebagaimana halnya telepon selular, telepon kabel melalui PT. Telkom juga melakukan pengembangan-pengembangan dengan membangun jaringan fiber optik (FO) yang untuk tahun 2017 ini membangun jaringan fiber optic (FO) di seputaran kota Ranai.

3.6.3. Warung Internet

Untuk warung internet (warnet) perkembangannya di Kabupaten Natuna menunjukkan angka penurunan. Warnet yang sebelumnya menunjukkan angka pertumbuhan pada kurun waktu 2011 – 2013. Dimana dari 9 warnet yang ada pada tahun 2011, berkembang menjadi 16 warnet pada tahun 2012 dan 2013. Namun pada tahun 2014 mulai menunjukkan penurunan yang cukup drastis, dimana warnet yang bertahan tinggal 8 warnet. Pada tahun 2015 dan 2016 kembali menurun, dimana angka warnet hanya 6 warnet yang berada di Kecamatan Bunguran Timur.

BAB IV
POLITIK HUKUM DAN KEAMANAAN

4.1. RUANG LINGKUP

Adapun Ruang Lingkup penyajian data pada bab bidang politik, hukum dan keamanan akan memaparkan data yang berhubungan dengan:

a. Politik
b. Produk hukum
c. Keamanan

Adapun data yang di tampilkan pada pembahasan ini akan memaparkan data yang berkaitan dengan Kabupaten natuna berupa data Statistik Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

4.2. KONSEP DAN DEFINISI

Pengertian – pengertian:

- Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik)

- Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011)
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011)

4.3. DATA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN NATUNA

Partai politik di Kabupaten Natuna yang berhasil memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Natuna.

Tabel: 4.3.1
Jumlah Anggota DPRD dirinci menurut Asal Partai

	Partai	Jumlah Anggota DPRD		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
	(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
01	Partai Demokrat	4	-	4
02	Partai Golongan Karya (Golkar)	3	-	3
03	Partai Amanat Nasional (PAN)	3	-	3
04	Partai Persatuan Pembangunan	3	-	3
05	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	2	-	2
06	Partai HANURA	2	-	2
07	Partai GERINDRA	2	-	2
08	Partai NASDEM	-	1	1
	Jumlah	**19**	**1**	**20**

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten NatunaTahun 2017

Tabel: 4.3.2
Jumlah Anggota DPRD Hasil Pemilu 2014 dirinci menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin

	Tingkat Pendidikan	Jumlah Anggota DPRD		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
	(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
01	SD	-	-	-
02	SLTP/MTs	-	-	-
03	SLTA/SMK/MA	8	-	8
04	D-III/ Sarjana Muda	1	1	2
05	D-IV	-	-	-
06	S-1	9	-	9
07	S-2	1	-	1
08	S-3	-	-	-
Jumlah		**19**	**1**	**20**

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Natuna Tahun 2017

Terlihat dari data di atas, bahwa dari 20 orang anggota DPRD Kabupaten Natuna hanya 1 (satu) orang yang perempuan.

Tabel: 4.3.3
Anggota DPRD Kabupaten Natuna Periode 2014 – 2019
menurut Susunan Fraksi

Nama Fraksi	Nama	Jabatan
(1)	*(2)*	*(3)*
1. Fraksi Demokrat	1. Dwitra Gunawan, SP	Ketua Fraksi
	2. Baharuddin, SP	Wakil Ketua
	3. Henry FN	Sekretaris
	4. Yusripandi	Anggota
2. Fraksi Golkar	1. Sudirman, SE	Ketua Fraksi
	2. Eri Marka, SE	Sekretaris
	3. Hadi Candra, S.Sos	Anggota
3. Fraksi PAN	1. Joharis Ibro	Ketua Fraksi
	2. Yohanis, A.Md	Sekretaris
	3. Daeng Amhar, SE, MM	Anggota
4. Fraksi PPP	1. Raja Marzuni, S.Pd.I	Ketua Fraksi
	2. H. Pang Ali, S.Pd.SD	Sekretaris
	3. Harken, S.Pd.Ek	Anggota
5. Fraksi PNR	1. Syaifullah	Ketua Fraksi
	2. Rusdi	Wakil Ketua
	3. Sunaryo	Sekretaris
	4. Wan Sofian	Anggota
6. Fraksi Gernas	1. Jarmin, SE	Ketua Fraksi
	2. Rokiyah, A.Md	Sekretaris
	3. Marzuki	Anggota

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Natuna Tahun 2017

Dari 6 (enam) fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Natuna, 2 (dua) fraksi merupakan fraksi gabungan yang diberi nama Fraksi Perjuangan Nurani Rakyat (Fraksi PNR) dan Fraksi Gernas.

Tabel: 4.3.4
Jumlah Anggota DPRD Dalam Tiap Komisi dirinci menurut Asal Fraksi

Fraksi	Komisi I	Komisi II	Komisi III
	Pemerintahan, Hukum/ Perundang – Undangan dan Kesejahteraan Rakyat	Ekonomi dan Pembangunan	Keuangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
Fraksi Demokrat	1	1	1
Fraksi Golkar	1	1	-
Fraksi PAN	1	1	-
Fraksi PPP	1	1	1
Fraksi PNR	1	1	2
Fraksi GerNas	1	1	1
Jumlah	**6**	**6**	**5**

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten NatunaTahun 2017

Tabel: 4.3.5

Anggota DPRD Kabupaten Natuna Periode 2014 - 2019 menurut Susunan Fraksi

	Fraksi	Jumlah Anggota
(1)	*(2)*	*(3)*
01	Fraksi Demokrat	4
02	Fraksi Partai Golongan Karya (Fraksi Golkar)	3
03	Fraksi Partai Amanat Nasional (Fraksi PAN)	3
04	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (Fraksi PPP)	3
05	Fraksi Perjuangan Nurani Rakyat (Fraksi PNR)	4
06	Fraksi GerNas	3
Jumlah		**20**

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Natuna Tahun 2017

Tabel: 4.3.6
Anggota DPRD Kabupaten Natuna Periode 2014 - 2019
menurut Susunan Komisi

Nama Komisi	Nama	Jabatan
(1)	*(2)*	*(3)*
1. **Komisi I**: Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1. Wan Sofian	Ketua Komisi
	2. Raja Marzuni, S.Pd.I	Wakil Ketua
	3. Jarmin, SE	Sekretaris
	4. Eri Marka, SE	Anggota
	5. Baharuddin, S.Pd	Anggota
	6. Joharis Ibro	Anggota
2. **Komisi II**: Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1. Yohanis, A.Md	Ketua Komisi
	2. Marzuki	Wakil Ketua
	3. Sudirman	Sekretaris
	4. H. Pang Ali	Anggota
	5. Dwitra Gunawan, SP	Anggota
	6. Sunaryo	Anggota
3. **Komisi III**: Bidang Keuangan	1. Harken, S.Pd.Ek	Ketua Komisi
	2. Rusdi	Wakil Ketua
	3. Henry FN	Sekretaris
	4. Syaifullah	Anggota
	5. Rokiyah	Anggota

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Natuna Tahun 2017

Tabel: 4.3.7
Kegiatan dan Produk DPRD Kabupaten Natuna

Produk	Jumlah Kegiatan	
	2015	2016
(1)	*(2)*	*(3)*
A. Produk		
1. Peraturan Daerah	7	8
2. Keputusan DPRD	16	23
3. Keputusan Pimpinan DPRD	2	2
B. Rapat		
1. Rapat Paripurna	48	35
2. Rapat Panitia Musyawarah	16	35
3. Rapat Panitia Anggaran	13	7
4. Rapat Panitia Khusus	10	35
5. Rapat Fraksi	4	8
6. Rapat Komisi	11	28
7. Demontrasi/Orientasi	-	-
C. Pengaduan Masyarakat		
1. Pengaduan yang masuk ke DPRD	-	-
2. Pengaduan yang diteruskan ke Bupati	-	-
3. Pengaduan yang ditindaklanjuti oleh Komisi	-	-

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Natuna Tahun 2017

4.4. DATA HUKUM

Tabel: 4.4.1
Data Jumlah Produk Hukum yang dikeluarkan Tahun 2015

Produk	Jumlah Kegiatan	
	2015	Satuan
(1)	*(2)*	*(3)*
a. Jumlah Perda yang sudah diterbitkan	7	Dokumen
b. Jumlah Peraturan Bupati	63	Dokumen
c. Jumlah Keputusan Bupati	321	Dokumen
d. MOU/Perjanjian Kerjasama	26	Dokumen

Sumber: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna

Tabel: 4.4.2
Data Jumlah Produk Hukum yang dikeluarkan Tahun 2016

Produk	Jumlah Kegiatan	
	2016	Satuan
(1)	*(2)*	*(3)*
a. Jumlah Perda yang sudah diterbitkan	8	Dokumen
b. Jumlah Peraturan Bupati	73	Dokumen
c. Jumlah Keputusan Bupati	318	Dokumen
d. MOU/Perjanjian Kerjasama	23	Dokumen

Sumber: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna

BAB V
INDUSTRI, PERDAGANGAN, LEMBAGA KEUANGAN KOPERASI, USAHA DAN INVESTASI

5.1. RUANG LINGKUP

Adapun Ruang Lingkup penyajian data pada bab bidang industri, perdagangan, lembaga keuangan koperasi, usaha dan investasi akan memaparkan data yang berhubungan dengan:

a. BUMD (Perusahaan Daerah, PDAM)
b. Perbankan dan Lembaga Keuangan Daerah
c. Industri Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional dan Koperasi

Adapun data yang di tampilkan pada pembahasan ini akan memaparkan data yang berkaitan dengan Kabupaten natuna berupa data Statistik Bidang Industri, Perdagangan, Lembaga Keuangan Koperasi, Usaha dan Investasi.

5.2. KONSEP DAN DEFINISI

5.2.1. KONSEP DAN DEFINISI BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengertianBadan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

5.2.2. KONSEP DAN DEFINISI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengertian Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disebut PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum.

5.2.3. KONSEP DAN DEFINISI PERBANKAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pengertian:

- Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya;
- Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;

5.2.4. KONSEP DAN DEFINISI DI BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL DAN KOPERASI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pengertian;

- Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan

hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, pengertian:

- Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

5.3. DATA BUMD

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah secara khusus mengatur BUMD pada BAB XII terdiri dari 12 Pasal, dimulai dari Pasal 331 sampai dengan Pasal 343 serta tersebar dibeberapa pasal, seperti Pasal 1 angka 40, Pasal 134 ayat (1) huruf c, 188 ayat (1) huruf c, 298 ayat (5) huruf c, 304 ayat (1) dan (2), 320 ayat (2) huruf g, 402 ayat (2), 405 dan Pasal 409.

Badan Usaha Milik Daerah yang ada di Natuna berbentuk Perusahaan Umum Daerah. Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Natuna berdiri dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah.

Tujuan didirikannya Perusda adalah turut serta mengadakan usaha yang seluas-luasnya, melaksanakan Pembangunan Daerah khususnya dan Pembangunan Ekonomi Nasional umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan masyarakat menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Berdasarkan Pasal 6, Perda No 2 Tahun 2004, Perusahaan Daerah bergerak dibidang:

a. Pasar dan pertokoan
b. Listrik
c. Apotek
d. Jasa transportasi
e. Penyaluran bahan bakar
f. Kontruksi
g. Perdagangan umum
h. Pariwisata dan jasa pendukungnya
i. Rekreasi
j. Pertambangan dan industri
k. Pertanian dan peternakan
l. Perkebunan dan kehutanan
m. Kelautan dan perikanan
n. Telekomunikasi dan informasi
o. Dan usaha-usaha lain dengan pertimbangan Badan pengawas dan persetujuan Kepala Daerah

Tabel: 5.3.1
Kondisi Pasar Ranai

No	Klasifikasi	Jumlah dan Nilai		Satuan
		2015	2016	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
I.	**Jumlah Kios dan Meja Pedagang**			
1.	Kios Besar	6	6	Unit
2.	Kios Besar Ditempati	6	6	Unit
3.	Kios Kecil	21	11	Unit
4.	Kios Kecil Ditempati	21	11	Unit
5.	Meja Pedagang Sayuran	30	30	Unit
6.	Meja Ditempati	30	30	Unit
7.	Meja Pedagang Ikan	43	43	Unit
8.	Meja Ditempati	43	43	Unit
9.	Meja Pedagang Ayam/Daging	9	9	Unit
10.	Meja Ditempati	9	9	Unit
II.	**Jumlah Pedagang**			
1.	Pedagang Kios	6	6	Orang
2.	Pedagang Sayuran	30	30	Orang
3.	Pedagang Ikan	43	43	Orang
4.	Pedagang Ayam / Daging	9	9	Orang

Sumber: Perusahaan Daerah Kabupaten NatunaTahun 2017

Pasar Ranai yang saat ini dikelola oleh Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten Natuna merupakan satu-satunya pasar tradisional yang ada di ibu kota Natuna (Ranai). Tak heran pasar ini selalu ramai dikunjungi masyarakat yang tinggal di kota Ranai maupun daerah-daerah pinggiran seperti dari Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kecamatan Bunguran Tengah, Kecamatan Bunguran Selatan, bahkan tak jarang pula dikunjungi oleh konsumen yang berada di pulau-pulau lainnya. Aktivitas di Pasar Ranai pada umumnya berlangsung dari jam 05.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB.

Untuk barang-barang yang dijual seperti sayur mayur, selain hasil produksi lokal, juga banyak di datangkan dari luar Natuna. Hal ini mengakibatkan harga-harga menajadi relatif tinggi. Sedangkan ikan merupakan hasil tangkapan dari nelayan-nelayan yang ada di Natuna, baik itu dari kawasan Ranai dan sekitarnya maupun dari daerah kepulauan yang ada di wilayah Kabupaten Natuna seperti Sedanau dan Pulau Tiga.

Dari data tersebut di atas bahwa untuk Jumlah Kios pada Tahun 2015 (21 unit) dan Tahun 2016 turun menjadi (11 unit), hal ini diakibatkan karena beralihnya pengelolaan kios. Bila semula kios sepenuhnya dikelola oleh Perusahaan Daerah, maka pada tahun 2016, sebanyak 10 kios diambil alih (dikelola) oleh pihak yang mempunyai lahan/tanah dan Perusda hanya mengelola 11 kios.

Tabel: 5.3.2
Biaya Sewa Kios/Meja di Pasar Ranai

Klasifikasi		Jumlah dan Nilai		Satuan
		2015	2016	
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*
Biaya Sewa				
1.	Kios Besar Per/Tahun	5.000.000	7.000.000	Rupiah
2.	Kios Kecil Per/Bulan	250.000	350.000	Rupiah
3.	Meja Sayuran Per/Bulan	150.000	200.000	Rupiah
4.	Meja Ikan Setahun (Total)	90.000.000	90.000.000	Rupiah
5.	Meja Ayam/Daging Per/Bulan	250.000	500.000	Rupiah

Sumber: Perusahaan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017

Untuk biaya sewa terjadi kenaikan dari tahun 2015 ke tahun 2016 untuk biaya sewa kios, meja sayur dan meja ayam/daging, terkecuali meja untuk penjualan ikan.

5.4. DATA PERUSAHAAN AIR MINUM DAERAH (PDAM) TIRTA NUSA

Pada tahun 2001 Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Tirta Nusa berada di bawah Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten Natuna dengan bentuk usaha unit PDAM Tirta Nusa. Pada tahun 2004, PDAM kemudian memisahkan diri dan berdiri sendiri.

Sebelum tahun 2016, PDAM Tirta Nusa hanya melayani kebutuhan air bersih di seputaran ibu kota Ranai, (Kecamatan

Bunguran Timur) Natuna dengan sumber mata air yang berada di Bukit Berangin dan Ranai Darat. Namun semenjak tahun 2017, PDAM kemudian melakukan pengembangan sampai diluar wilayah Kecamatan Bunguran Timur dengan adanya penambahan sumber air baru. Beberapa wilayah pengembangan baru layanan PDAM yaitu Pengadah, Teluk Buton, Tapau, Batubi dan Pian Tengah.

Tabel: 5.4.1
Produksi PDAM

Tahun	Pelanggan	Produksi Sumber	Produksi Penjualan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
2015	4.131	2.721.329 m^3	1.401.329 m^3
2016	5.414	2.892,672 m^3	1.407.490 m^3

Sumber: PDAM Tirta Nusa Kabupaten Natuna Tahun 2017

Tabel: 5.4.2
Wilayah Pelayanan PDAM Per Januari Tahun 2016

Kecamatan	Jumlah Sambungan Rumah (SR)	Jumlah Penduduk	Jumlah Jiwa Terlayani	Penduduk Terlayani (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Bunguran Timur	5.001	23.888	19.672	82.35
Bunguran Selatan	413	2.931	1.652	56.36

Sumber: PDAM Tirta Nusa Kabupaten Natuna Tahun 2017

5.5. INDUSTRI PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL DAN KOPERASI

Tabel: 5.5.1
Jumlah Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Natuna menurut Kecamatan

	Kecamatan	Jumlah	
		2015	2016
	(1)	*(2)*	*(3)*
1	Bunguran Timur	1045	1045
2	Bunguran Barat	878	878
3	Bunguran Utara	308	308
4	Bunguran Selatan	224	224
5	Bunguran Tengah	135	138
6	Bunguran Timur Laut	302	302
7	Bunguran Batubi	-	-
8	Midai	301	301
9	Suak Midai	-	-
10	Serasan	248	248
11	Serasan Timur	170	170
12	Subi	117	117
13	Pulau Tiga	542	542
14	Pulau Tiga Barat	-	-
15	Pulau Laut	204	204
	JUMLAH	**4474**	**4474**

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna Tahun 2017

Bahwa dari data di atas terlihat dari tahun 2015 ke tahun 2016 untuk usaha kecil menengah belum ada kenaikan yang dilihat dari segi jumlah (banyaknya kegiatan usaha).

Tabel: 5.5.2

Jumlah Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Natuna menurut Kecamatan Tahun 2016

Kecamatan	Pertanian/ Perkebunan	Perikanan	Peternakan	IRT	BBM
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Bunguran Timur	53	104	87	19	8
Bunguran Barat	101	312	53	19	8
Bunguran Utara	8	112	5	27	-
Bunguran Selatan	50	45	55	9	3
Bunguran Tengah	39	4	7	12	-
Bunguran Timur Laut	44	49	52	6	3
Bunguran Batubi	-	-	-	-	
Midai	4	22	10	37	4
Suak Midai	-	-	-	-	
Serasan	2	79	8	30	-
Serasan Timur	1	44	5	28	1
Subi	-	46	5	1	5
Pulau Tiga	13	278	14	48	9
Pulau Tiga Barat	-	-	-	-	
Pulau Laut	1	79	16	8	1
JUMLAH	**316**	**1.740**	**317**	**244**	**42**

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna Tahun 2017

Tabel: 5.5.3

Jumlah Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Natuna menurut Kecamatan Tahun 2016

Kecamatan	Perdagangan	Pertukangan	Pertambangan	Jasa
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Bunguran Timur	528	103	-	143
Bunguran Barat	256	51	1	77
Bunguran Utara	131	10	-	15
Bunguran Selatan	43	8	-	11
Bunguran Tengah	55	7	-	11
Bunguran Timur Laut	110	27	1	10
Bunguran Batubi	-	-	-	-
Midai	175	20	-	29
Suak Midai	-	-	-	-
Serasan	104	8	-	17
Serasan Timur	73	10	-	8
Subi	38	16	-	6
Pulau Tiga	148	15	-	17
Pulau Tiga Barat	-	-	-	-
Pulau Laut	79	9	-	11
JUMLAH	**1.740**	**284**	**2**	**355**

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna Tahun 2017

Adapun klasifikasi usaha, yaitu usaha kecil dan kerajinan rumah tangga, usaha sedang dan usaha besar.

Tabel: 5.5.4
Banyaknya Perusahaan Industri menurut Klasifikasi Industri di Kabupaten Natuna

	KECAMATAN	Besar > 200jt	Sedang 5-200jt	Kecil dan Kerajinan RT < 5jt	Jumlah
	(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Bunguran Timur	-	10	10	20
2	Bunguran Barat	-	5	4	9
3	Bunguran Utara	-	2	7	9
4	Bunguran Selatan	-	2	7	9
5	Bunguran Tengah	-	6	16	22
6	Bunguran Timur Laut	-	13	25	38
7	Bunguran Batubi	-	-	-	-
8	Midai	-	-	25	25
9	Suak Midai	-	-	-	-
10	Serasan	-	-	6	6
11	Serasan Timur	-	-	5	5
12	Subi	-	-	9	9
13	Pulau Tiga	-	4	18	22
14	Pulau Tiga Barat	-	-	-	-
15	Pulau Laut	-	-	14	14
	JUMLAH	**-**	**42**	**146**	**188**

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna Tahun 2017

Selain usaha kecil menengah, koperasi juga memegang andil yang besar dalam menopang ekonomi daerah. Fungsi dan peran Koperasi adalah:

a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Di Kabupaten Natuna terdapat koperasi dengan jenis simpan pinjam, konsumen, produsen, pemasan dan jasa sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel: 5.5.5
Jumlah Koperasi yang Aktif di Kabupaten Natuna menurut Jenis

	Jenis Koperasi	Jumlah Koperasi	Jumlah Anggota
	(1)	*(2)*	*(3)*
1	Simpan Pinjam	3	241
2	Konsumen	20	2287
3	Produsen	13	403
4	Pemasaran	6	290
5	Jasa	4	188
	Jumlah 2016	**46**	**3409**
	Jumlah 2015	44	3379

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna Tahun 2017

Dari data di atas terlihat bahwa jumlah koperasi yang aktif ada di Kabupaten Natuna pada tahun 2015 adalah 44 buah dengan jumlah anggota 3,379 orang. Sedangkan pada tahun 2016 meningkat menjadi 46 koperasi dengan anggota 3,409 orang.

Tabel: 5.5.6
Jumlah Koperasi di Kabupaten Natuna menurut Kondisi Yang Ada

	Kecamatan	Kondisi Koperasi			
		Tidak Aktif	Beku	Baru	Aktif
	(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Bunguran Timur	50	-	1	23
2	Bunguran Barat	9	-	-	2
3	Bunguran Utara	9	-	-	1
4	Bunguran Selatan	1	-	-	4
5	Bunguran Tengah	5	-	-	1
6	Bunguran Timur Laut	6	-	1	2
7	Bunguran Batubi	9	-	-	1
8	Midai	3	-	1	3
9	Suak Midai	-	-	-	-
10	Serasan	14	-	1	2
11	Serasan Timur	5	-	1	1
12	Subi	4	-	-	2
13	Pulau Tiga	7	-	1	1
14	Pulau Tiga Barat	2	-	1	1
15	Pulau Laut	3	-	-	2
	JUMLAH 2016	**127**	**-**	**7**	**46**
	JUMLAH 2015	117	-	10	44

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna Tahun 2017

Tabel di atas menggambarkan kondisi koperasi yang ada di Kabupaten Natuna. Dari kondisi koperasi baik itu yang tidak aktif, beku, baru dan aktif, koperasi di Kabupaten Natuna pada tahun 2015 berjumlah 171 koperasi dan di tahun 2016 naik 180 koperasi.

BAB VI
SUMBER DAYA ALAM

6.1. RUANG LINGKUP

Bagi manusia, sumber daya alam pada hakikatnya merupakan hal terpenting baik berupa benda hidup (hayati) ataupun benda mati (non-hayati). Kedua jenis sumber daya alam tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Adapun Ruang Lingkup penyajian data yang dimunculkan pada bab Sumber Daya Alam ini akan memaparkan data yang berhubungan dengan:

a. Luas Tanaman, Luas Panen dan Produksi Bahan Makanan menurut komoditas
b. Luas Tanaman, Luas Panen dan Produksi Holtikultura menurut komoditas
c. Luas Lahan Perkebunan dan Produksi Perkebunan
d. Jumlah Kelompok Tani menurut komoditas
e. Populasi Ternak, menurut jenis dan Jumlah Produksi
f. Produksi Perikanan Budidaya
g. Produksi Perikanan Tangkap

Pemanfaatan suatu sumber daya ditentukan berdasarkan kegunaan sumber daya tersebut untuk manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, semakin bermanfaat suatu sumber daya alam maka akan semakin bernilai sumber daya alam tersebut. Contohnya saja, lahan pertanian yang subur akan dapat dijadikan daerah pertanian yang

sangat potensial. Suatu daerah yang memiliki sumber daya yang berlimpah dipastikan menjadi daerah yang maju jika dimanfaatkan secara maksimal.

6.2. KONSEP DAN DEFINISI

Beberapa konsep dan definisi yang terdapat dalam pemaparan data tentang sumber daya alam ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk ekosistem (UU Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1).

2. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem (UU Nomor 19 Tahun 2013 Pasal 1).

3. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, Benih, Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, Pakan, Alat dan Mesin Peternakan, budidaya Ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana (UU Nomor 41 Tahun 2014 Pasal 1).

4. Menurut UU Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 1 yang dimaksud dengan Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan, sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

5. Perikanan Budidaya adalah usaha pemeliharaan dan pengembangbiakan ikan atau organisme air lainnya (udang, kerang, hingga tanaman air).

6. Perikanan Tangkap adalah perikanan yang basis usahanya berupa penangkapan ikan di laut maupun di perairan umum.

7. Rumah Tangga Perikanan (RTP) adalah rumah tangga yang melakukan usaha penangkapan/budidaya ikan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual.

Tabel: 6.2.1
Luas Tanam Bahan Makanan (Ha) menurut Komoditas
di Kabupaten Natuna

Kecamatan	Padi	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Kacang Tanah	Talas
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
Midai	-	2,2	3,3	0,7	-	2,2
Bunguran Barat	122,9	4	2	3	2,4	-
Bunguran Utara	-	-	5	3	-	-
Pulau Laut	-	0,75	0,6	0,1	-	-
Pulau Tiga	-	1,1	2	0,3	-	-
Bunguran Timur	-	1	0,8	-	-	0,3
Bunguran Timur Laut	1	-	26	3	-	-
Bunguran Tengah	17,5	4,1	1,7	1,2	3,3	-
Bunguran Selatan	-	3,3	4	0,3	0,2	-
Serasan	-	16	18	11	-	-
Subi	-	5	6	1,4	1,3	2
Serasan Timur	47	20	19	12	-	-
JUMLAH 2016	**188,4**	**57,45**	**88,4**	**36**	**7,2**	**4,5**
JUMLAH 2015	156	50	58	31	5	-

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Natuna Tahun 2017

Tabel: 6.2.2
Luas Panen Bahan Makanan (Ha) menurut Komoditas di Kabupaten Natuna

Kecamatan	Padi	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Kacang Tanah	Talas
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
Midai	-	2,2	3,1	0,6	-	1,7
Bunguran Barat	56	7	2	3	2,4	-
Bunguran Utara	-	1	6	3	-	-
Pulau Laut	-	0,75	0,55	0,1	-	-
Pulau Tiga	-	1,1	1,5	0,3	-	-
Bunguran Timur	-	1	-	0,75	-	-
Bunguran Timur Laut	1	0,8	20	3	-	-
Bunguran Tengah	11	3,8	1,2	1	2,8	-
Bunguran Selatan	-	4,3	6,5	0,1	0,2	-
Serasan	-	14	20	12	-	-
Subi	-	5	5	0,4	0,8	2
Serasan Timur	77,6	18	20	12	-	-
JUMLAH 2016	**145,6**	**58,95**	**85,85**	**36,25**	**6,2**	**3,7**
JUMLAH 2015	125	54	60	27	9	-

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Natuna Tahun 2017

Tabel: 6.2.3
Produksi Bahan Makanan (Ton) menurut Komoditas di Kabupaten Natuna

Kecamatan	Padi	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Kacang Tanah	Talas
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
Midai	-	4,4	-	4,8	-	3,8
Bunguran Barat	140	21	20	45	4,8	-
Bunguran Utara	-	2	60	24	-	-
Pulau Laut	-	1,13	5,5	0,7	-	-
Pulau Tiga	-	2,2	22,5	2,1	-	-
Bunguran Timur	-	1,5	-	6	-	-
Bunguran Timur Laut	2	1,2	300	30	-	-
Bunguran Tengah	13,2	9,5	24	12	4,2	-
Bunguran Selatan	-	10,75	65	0,8	0,2	-
Serasan	-	35	400	120	-	-
Subi	-	10	50	3,2	0,8	4
Serasan Timur	232,8	45	400	120	-	-
JUMLAH 2016	**388**	**143,68**	**1.347**	**368,6**	**10**	**7,8**
JUMLAH 2015	256,7	90	98	1.085	10,5	-

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Natuna Tahun 2017

Tabel: 6.2.4
Luas Tanam Sayuran (Ha) menurut Komoditas di Kabupaten Natuna

Kecamatan	Cabai Besar	Cabai Rawit	Ketimun	Terong	Kacang Panjang
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Midai	0,1	9	0,8	2,2	3,4
Bunguran Barat	0,5	0,5	5	2	4,5
Bunguran Utara	-	1,3	-	-	2,1
Pulau Laut	-	1,3	0,2	0,9	0,8
Pulau Tiga	-	1,4	0,2	0,9	1,1
Bunguran Timur	-	2,4	0,2	1,1	0,3
Bunguran Timur Laut	-	3,5	-	1,14	2,4
Bunguran Tengah	2,8	3,4	0,65	1,5	3,6
Bunguran Selatan	-	4	0,1	-	0,6
Serasan	-	6	12	10	12
Subi	0,3	0,3	2,7	1,3	1,5
Serasan Timur	-	6	13	6	9
JUMLAH 2016	**3,7**	**39,1**	**34,85**	**27,04**	**41,3**
JUMLAH 2015	20	36	31	28	43

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Natuna Tahun 2017

Lanjutan Tabel: 6.2.4
Luas Tanam Sayuran (Ha) menurut Komoditas di Kabupaten Natuna

Kecamatan	Bayam	Kangkung	Sawi	Bawang Daun
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Midai	4,4	5	2,2	0,4
Bunguran Barat	9,5	8,75	7,5	0,6
Bunguran Utara	-	-	-	-
Pulau Laut	0,3	1,15	-	-
Pulau Tiga	-	1	-	-
Bunguran Timur	0,7	-	1	-
Bunguran Timur Laut	-	2,5	-	-
Bunguran Tengah	1,25	1,55	2,4	-
Bunguran Selatan	0,1	0,2	0,6	-
Serasan	15	13	-	-
Subi	3	3,1	1,5	-
Serasan Timur	13	12	-	-
JUMLAH 2016	**47,3**	**48,3**	**15,2**	**1**
JUMLAH 2015	39	45	22	4

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Natuna Tahun 2017

Lanjutan Tabel: 6.2.4
Luas Tanam Sayuran (Ha) menurut Komoditas di Kabupaten Natuna

Kecamatan	Buncis	Labu Siam	Semangka	Tomat
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Midai	1,9	-	-	1,45
Bunguran Barat	0,3	0,1	1,3	0,1
Bunguran Utara	-	-	-	-
Pulau Laut	-	0,1	0,5	-
Pulau Tiga	-	-	-	-
Bunguran Timur	-	0,2	-	-
Bunguran Timur Laut	-	-	-	-
Bunguran Tengah	0,7	-	-	0,7
Bunguran Selatan	0,2	-	2,5	-
Serasan	-	-	7	-
Subi	-	0,3	2,5	1,4
Serasan Timur	-	-	2	-
JUMLAH 2016	**3,1**	**0,7**	**15,8**	**3,65**
JUMLAH 2015	5	2	29	5

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Natuna Tahun 2017

Tabel: 6.2.5
Luas Panen Sayuran (Ha) menurut Komoditas di Kabupaten Natuna

Kecamatan	Cabai Besar	Cabai Rawit	Ketimun	Terong	Kacang Panjang
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Midai	0,1	7,1	0,4	2,2	3,4
Bunguran Barat	1,3	0,5	3	21	2
Bunguran Utara	-	0,9	-	-	1,5
Pulau Laut	-	1,05	0,1	0,9	-
Pulau Tiga	-	1,9	0,2	0,9	1
Bunguran Timur	-	2	0,1	2,1	1
Bunguran Timur Laut	-	3	-	1,14	1,2
Bunguran Tengah	1,5	1,7	0,3	1,5	2,35
Bunguran Selatan	0,2	7,2	-	-	0,8
Serasan	-	6	12	10	8
Subi	1,3	0,4	2,2	2,6	1,7
Serasan Timur	-	6	8	8	8
JUMLAH 2016	**4,4**	**37,8**	**26,3**	**50,34**	**31**
JUMLAH 2015	40	71	43	30	63

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Natuna

Lanjutan Tabel: 6.2.5
Luas Panen Sayuran (Ha) menurut Komoditas di Kabupaten Natuna

Kecamatan	Bayam	Kangkung	Sawi	Bawang Daun
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Midai	4,4	5	2,2	0,2
Bunguran Barat	8,75	8,55	6,5	0,4
Bunguran Utara	-	-	-	-
Pulau Laut	0,3	1,15	0,2	-
Pulau Tiga	-	1	-	-
Bunguran Timur	0,3	0,1	0,1	-
Bunguran Timur Laut	-	2,5	-	-
Bunguran Tengah	1,35	1,6	2,3	-
Bunguran Selatan	-	0,2	0,4	-
Serasan	11	11	-	3
Subi	2,5	2,8	1,7	-
Serasan Timur	10	10	-	-
JUMLAH 2016	**38,6**	**43,9**	**13,4**	**3,6**
JUMLAH 2015	51	57	28	5

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Natuna Tahun 2017

Lanjutan Tabel: 6.2.5
Luas Panen Sayuran (Ha) menurut Komoditas di Kabupaten Natuna

Kecamatan	Buncis	Labu Siam	Semangka	Tomat
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Midai	1,9	-	-	1,25
Bunguran Barat	-	-	1,3	-
Bunguran Utara	-	-	-	-
Pulau Laut	-	0,2	0,5	-
Pulau Tiga	-	-	-	-
Bunguran Timur	0,1	0,1	-	
Bunguran Timur Laut	-	-	-	-
Bunguran Tengah	0,7	-	-	0,5
Bunguran Selatan	0,5	-	5	1
Serasan	-	-	7	-
Subi	-	0,3	4	1,6
Serasan Timur	-	-	2	-
JUMLAH 2016	**3,2**	**0,6**	**19,8**	**4,35**
JUMLAH 2015	5	1	31	10

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Natuna Tahun 2017

Tabel: 6.2.6
Produksi Sayuran (Ton) menurut Komoditas di Kabupaten Natuna

Kecamatan	Cabai Besar	Cabai Rawit	Ketimun	Terong	Kacang Panjang
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Midai	1	5,4	9,6	1,3	8,9
Bunguran Barat	7,1	16,5	14	114	11,2
Bunguran Utara	1	0,6	0,8	-	0,8
Pulau Laut	-	1,3	0,4	0,6	0,8
Pulau Tiga	-	0,3	0,3	0,3	0,2
Bunguran Timur	1	0,3	0,4	1	1,1
Bunguran Timur Laut	-	1,7	1,1	3,2	0,9
Bunguran Tengah	17,2	1,87	12,4	15,8	1,9
Bunguran Selatan	0,2	1,8	2,9	-	0,5
Serasan	-	3,2	17	55,5	6,4
Subi	1	1,7	1,4	12,5	0,8
Serasan Timur	-	3,2	12	45,5	5,4
JUMLAH 2016	**28,5**	**37,9**	**72,3**	**249,7**	**38,9**
JUMLAH 2015	59,3	37	73	109	25,6

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Natuna Tahun 2017

Lanjutan Tabel: 6.2.6
Produksi Sayuran (Ton) menurut Komoditas di Kabupaten Natuna

Kecamatan	Bayam	Kangkung	Sawi	Bawang Daun
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Midai	4,1	5,4	2,5	0,2
Bunguran Barat	32	18,3	33,3	0,3
Bunguran Utara	-	-	-	-
Pulau Laut	0,2	0,6	-	-
Pulau Tiga	-	0,6	-	-
Bunguran Timur	0,3	0,1	0,2	-
Bunguran Timur Laut	-	0,9	-	-
Bunguran Tengah	4,6	14,7	4,11	-
Bunguran Selatan	-	0,1	0,4	-
Serasan	21,5	5,3	-	3
Subi	0,1	0,3	0,5	-
Serasan Timur	17,3	5,6	-	-
JUMLAH 2016	**80,1**	**51,9**	**41**	**3,5**
JUMLAH 2015	75,1	62,4	24,5	1,7

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Natuna Tahun 2017

Lanjutan Tabel: 6.2.6
Produksi Sayuran (Ton) menurut Komoditas di Kabupaten Natuna

Kecamatan	Buncis	Labu Siam	Semangka	Tomat
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Midai	1	-	-	21
Bunguran Barat	-	3	8,5	3,5
Bunguran Utara	-	-	-	-
Pulau Laut	-	0,2	14	-
Pulau Tiga	-	-	-	-
Bunguran Timur	0,5	1	-	1,5
Bunguran Timur Laut	-	-	-	-
Bunguran Tengah	6,3	-	-	32,7
Bunguran Selatan	0,8	-	100	2,5
Serasan	-	-	100	-
Subi	-	0,2	24	6
Serasan Timur	-	-	90	-
JUMLAH 2016	**8,6**	**4,4**	**337**	**67,2**
JUMLAH 2015	13	3	252	23,5

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Natuna Tahun 2017

Tabel: 6.2.7
Luas Lahan Perkebunan (Ha) menurut Jenis di Kabupaten Natuna

Kecamatan	Karet	Kelapa	Cengkeh	Sagu
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Midai	105	2.596	893	-
Bunguran Barat	110	925	790	145
Bunguran Utara	165	1.990	690	16
Pulau Laut	100	1.100	350	25
Pulau Tiga	-	320	903	-
Bunguran Timur	980	1.390	1.075	-
Bunguran Timur Laut	625	532	1.590	66
Bunguran Tengah	1.150	41	-	-
Bunguran Selatan	706	1.050	1.375	-
Serasan	116	286	2.740	-
Subi	16	588	907	-
Serasan Timur	163	576	729	-
JUMLAH 2016	**4.236**	**11.394**	**12.042**	**252**
JUMLAH 2015	4.266	14.004	12.189	261

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Natuna Tahun 2017

Tabel: 6.2.8
Produksi Perkebunan (Ton) menurut Jenis di Kabupaten Natuna

Kecamatan	Karet	Kelapa	Cengkeh	Sagu
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Midai	30	950	900	-
Bunguran Barat	350	800	200	1
Bunguran Utara	189	850	135	0,5
Pulau Laut	55	350	30	0,5
Pulau Tiga	-	63	150	-
Bunguran Timur	1.200	700	75	-
Bunguran Timur Laut	800	950	80	66
Bunguran Tengah	1.670	4	-	-
Bunguran Selatan	150	500	900	-
Serasan	240	300	300	-
Subi	10	445	135	-
Serasan Timur	24	300	60	-
JUMLAH 2016	**4.718**	**6.212**	**2.965**	**68**
JUMLAH 2015	2.732	5.708	2.030	10

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Natuna tahun 2017

Tabel: 6.2.9
Jumlah Petani (KK) menurut Jenis di Kabupaten Natuna

Kecamatan	Karet	Kelapa	Cengkeh	Sagu
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Midai	50	1.000	700	-
Bunguran Barat	100	400	345	85
Bunguran Utara	120	840	250	15
Pulau Laut	65	450	150	10
Pulau Tiga	-	220	350	-
Bunguran Timur	950	800	1.200	-
Bunguran Timur Laut	352	1.500	800	35
Bunguran Tengah	601	170	-	-
Bunguran Selatan	165	650	850	-
Serasan	50	150	750	-
Subi	10	463	293	-
Serasan Timur	75	275	350	-
JUMLAH 2016	**2.538**	**6.918**	**6.038**	**145**
JUMLAH 2015	2.586	6.918	6.038	145

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Natuna Tahun 2017

Tabel: 6.2.10
Populasi Unggas menurut Jenis di Kabupaten Natuna Tahun 2016

Kecamatan	Ayam Kampung	Ayam Pedaging	Itik
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
Midai	18.460	-	26
Suak Midai	-	-	-
Bunguran Barat	9.390	-	466
Bunguran Batubi	-	-	-
Bunguran Utara	2.050	-	36
Pulau Laut	540	-	20
Pulau Tiga	2.100	-	177
Pulau Tiga Barat	-	-	-
Bunguran Timur	7.520	217.000	689
Bunguran Timur Laut	7.255	6.000	51
Bunguran Tengah	6.395	108.000	522
Bunguran Selatan	7.470	144.000	30
Serasan	1.105	-	294
Subi	3.430	-	41
Serasan Timur	6.255	2.400	628
JUMLAH	**71.970**	**477.400**	**2.980**

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Natuna Tahun 2017

Tabel: 6.2.11
Produksi Telur menurut Jenis di Kabupaten Natuna

Kecamatan	Telur Ayam Kampung (Kg)	Telur Itik (Kg)
(1)	*(2)*	*(4)*
Midai	1.858	3
Suak Midai	-	-
Bunguran Barat	945	47
Bunguran Batubi	-	-
Bunguran Utara	206	4
Pulau Laut	54	2
Pulau Tiga	211	18
Pulau Tiga Barat	-	-
Bunguran Timur	757	69
Bunguran Timur Laut	730	5
Bunguran Tengah	644	53
Bunguran Selatan	752	3
Serasan	111	30
Subi	354	4
Serasan Timur	630	63
JUMLAH 2016	**7.252**	**301**
JUMLAH 2015	7.384	303

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Natuna Tahun 2017

Tabel: 6.2.12
Populasi Ternak menurut Jenis di Kabupaten Natuna Tahun 2016

Kecamatan	Sapi	Kuda	Kambing	Itik	Ayam Buras	Ayam Broiler
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
Midai	1.078	-	396	26	18.460	-
Suak Midai	-	-	-	-	-	-
Bunguran Barat	936	-	352	466	9.390	-
Bunguran Batubi	-	-	-	-	-	-
Bunguran Utara	668	-	11	36	2.050	-
Pulau Laut	560	-	-	20	540	-
Pulau Tiga	39	-	59	177	2.100	-
Pulau Tiga Barat	-	-	-	-	-	-
Bunguran Timur	1.604	1	18	689	7.520	283.000
Bunguran Timur Laut	789	-	10	51	7.255	1.200
Bunguran Tengah	1.355	-	32	522	6.395	120.100
Bunguran Selatan	1.322	-	12	30	7.470	150.000
Serasan	76	-	-	294	1.105	-
Subi	343	-	80	41	3.430	-
Serasan Timur	122	-	482	628	6.255	2.400
JUMLAH	**8.892**	**1**	**1.452**	**2.980**	**71.970**	**556.700**

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Natuna Tahun 2017

Tabel: 6.2.13
Produksi Daging menurut Jenis di Kabupaten Natuna Tahun 2016

Bulan	Sapi (Kg)	Kerbau (Kg)	Kambing (Kg)	Ayam Kampung/Buras (Kg)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Januari	1.200	-	-	675
Februari	1.440	-	-	750
Maret	1.320	-	-	780
April	1.300	-	-	750
Mei	1.560	-	-	810
Juni	2.860	-	-	900
Juli	1.680	-	-	1.050
Agustus	1.040	-	-	750
September	38.850	60	105	975
Oktober	1.690	-	-	720
November	1.495	-	-	735
Desember	1.680	-	-	1.050
JUMLAH	**56.115**	**60**	**105**	**9.945**

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Natuna Tahun 2017

Tabel: 6.2.14
Produksi Budidaya Ikan Laut menurut Kecamatan di Kabupaten Natuna

Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya (RTP)	Jumlah Keramba (Kantong)	Produksi Budidaya Ikan Laut (Ton)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
Bunguran Timur	78	104	5,28
Bunguran Timur Laut	20	71	-
Bunguran Selatan	22	25	-
Bunguran Tengah	89	-	-
Bunguran Barat	339	815	24,13
Bunguran Utara	15	105	67,30
Pulau Tiga	327	349	1,18
Pulau Laut	60	98	85,61
Midai	5	22	1,62
Subi	30	32	8,89
Serasan/Serasan Timur	162	292	22,25
JUMLAH 2016	**1.147**	**1.913**	**216,26**
JUMLAH 2015	1.040	2.132	377,85

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2017

Tabel: 6.2.15
Produksi Budidaya Rumput Laut menurut Kecamatan di Kabupaten Natuna

Kecamatan	Luas Areal Budidaya Rumput Laut (Ha)	Produksi Budidaya Rumput Laut (Ton)
(1)	*(2)*	*(3)*
Bunguran Timur	0,02	0,01
Bunguran Timur Laut	-	-
Bunguran Selatan	0,04	0,03
Bunguran Tengah	-	-
Bunguran Barat	1,50	0,55
Bunguran Utara	-	-
Pulau Tiga	42,45	15.938,45
Pulau Laut	-	-
Midai	-	-
Subi	-	-
Serasan/Serasan Timur	3,03	2,01
JUMLAH 2016	**47,04**	**15.941,05**
JUMLAH 2015	0,29	142,79

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2017

Tabel: 6.2.16
Produksi Budidaya Ikan Air Tawar menurut Kecamatan di Kabupaten Natuna

Kecamatan	Luas Areal Budidaya Ikan Air Tawar (Ha)	Produksi Budidaya Ikan Air Tawar (Ton)
(1)	*(2)*	*(3)*
Bunguran Timur	2,04	41,76
Bunguran Timur Laut	0,72	1,24
Bunguran Selatan	-	-
Bunguran Tengah	3,27	1,86
Bunguran Barat	-	-
Bunguran Utara	-	-
Pulau Tiga	-	-
Pulau Laut	-	-
Midai	-	-
Subi	-	-
Serasan/Serasan Timur	-	-
JUMLAH 2016	**6,03**	**44,86**
JUMLAH 2015	6,92	234,18

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2017

Tabel: 6.2.17
Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) dan Armada Nelayan Tangkap Ikan Laut di Kabupaten Natuna

Kecamatan	Rumah Tangga Perikanan (RTP)	Armada		
		Perahu Tanpa Motor	Kapal Motor	Motor Tempel
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Bunguran Barat	884	96	267	21
Bunguran Selatan	671	100	306	7
Bunguran Tengah	142	-	-	-
Bunguran Timur	654	49	570	28
Bunguran Timur Laut	554	119	240	7
Bunguran Utara	171	89	163	6
Midai	225	84	150	39
Pulau Laut	200	84	151	3
Pulau Tiga	373	33	219	9
Pulau Tiga Barat	173	22	97	3
Serasan	544	224	195	26
Serasan Timur	258	150	154	9
Subi	272	83	303	1
JUMLAH 2016	**5.121**	**1.133**	**2.815**	**159**
JUMLAH 2015	7.066	1.242	2.755	92

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2017

Tabel: 6.2.18
Produksi Hasil Tangkap Ikan Laut (Ton) menurut Jenis di Kabupaten Natuna

	Jenis	Tahun	
		2015	2016
	(1)	(2)	(3)
01	Kerapu	2,428.39	2,292.97
02	Kurisi	-	1,322.74
03	Pari	752.00	795.49
04	Selar	2,673.06	2,035.24
05	Bambangan/Kakap Merah	2,625.00	5,099.14
06	Anggoli	-	669.73
07	Tumpu (Ikan Merah)	-	796.74
08	Kuwe/Mayuk	3,917.90	3,984.63
09	Biji Nangka Lencam	-	361.33
10	Mancung	-	588.41
11	Kaci	-	693.31
12	Tongkol	3,674.66	5,766.94
13	Kalat	-	648.17
14	Kembung Mahan	366.93	1,181.83
15	Ekor Kuning	3,288.00	3,481.60
16	Tenggiri	3,522.00	4,194.74
17	Teri	1,025.00	2,392.91
18	Selayang	2,762.13	6,645.31
19	Jahan	-	778.41
20	Tamban	-	506.10

	Jenis	Tahun	
		2015	2016
	(1)	*(2)*	*(3)*
21	Hiu	-	246.72
22	Kakap	3,511.09	599.13
23	Bunga Baruk	-	1,424.54
24	Belanak	785.82	2,049.71
25	Lainnya	1,528.57	2,764.65
26	Cucut	798.18	-
27	Bawal Hitam	619.00	-
28	Alu-Alu	752.00	-
29	Japuh	2,161.14	-
30	Cekalang	3,509.08	-
31	Kepiting Rajungan	1,342.33	2,922.61
32	Cumi	5,814.25	10,079.98
33	Sotong	221.33	374.03
34	Udang	621.00	483.25
	JUMLAH	**48,698.85**	**65,180.34**

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2017

DATA PRODUKSI MENURUT JENIS DAN JUMLAH ALAT TANGKAP IKAN

TAHUN 2016

No	Nama Kecamatan	Produksi Menurut Jenis Alat Tangkap																			
		Pancing Ulur	Prod (Ton)	Pancing Tonda	Prod (Ton)	Bagan	Prod (Ton)	Jaring Pantai	Prod (Ton)	Sero	Prod (Ton)	Rawai	Prod (Ton)	Bubu	Prod (Ton)	Kelong	Prod (Ton)	Tangkul	Prod (Ton)	Alat Lainnya	Prod (Ton)	Total Produksi (Ton)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
1	Bunguran Barat	753	5963,76	98	676,20	77	3465,00	85	107,10	0	0,00	8	122,88	8974	6461,3	55	39,60	0	0,00	0	0,00	16835,82
2	Bunguran Selatan	152	1203,84	172	1186,80	0	0,00	18	22,68	6	28,08	8	122,88	132	95,04	0	0,00	141	169,20	23	103,50	2932,02
3	Bunguran Tengah	62	491,04	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	80	57,6	0	0,00	0	0,00	0	0,00	548,64
4	Bunguran Timur	242	1916,64	344	2373,60	0	0,00	19	23,94	0	0,00	0	0,00	299	215,28	5	3,60	0	0,00	0	0,00	4533,06
5	Bungura Timur Laut	213	1686,96	210	1449,00	5	225,00	54	68,04	6	28,08	10	153,60	120	86,40	0	0,00	12	14,40	24	108,00	3819,48
6	Bunguran Utara	52	411,84	11	75,90	0	0,00	26	32,76	0	0,00	0	0,00	79	56,88	0	0,00	0	0,00	0	0,00	577,38
7	Midai	62	491,04	81	558,90	0	0,00	1	1,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1051,20
8	Pulau Laut	90	712,80	66	455,40	2	90,00	12	15,12	0	0,00	0	0,00	21	15,12	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1288,44
9	Pulau Tiga	294	2328,48	0	0,00	6	270,00	0	0,00	0	0,00	1	15,36	40	28,80	1	0,72	0	0,00	0	0,00	2643,36
10	Pulau Tiga Barat	77	609,84	11	75,90	1	45,00	0	0,00	0	0,00	8	122,88	35	25,20	3	2,16	0	0,00	7	31,50	912,48
11	Serasan Barat	615	4870,80	517	3567,30	28	1260,00	44	55,44	0	0,00	13	199,68	1280	921,60	9	6,48	0	0,00	0	0,00	10881,30
12	Serasan Timur	318	2518,56	378	2608,20	0	0,00	12	15,12	0	0,00	2	30,72	820	590,40	5	3,60	0	0,00	0	0,00	5766,60
13	Subi	283	2241,36	286	1973,40	0	0,00	170	214,20	0	0,00	500	7680,00	1780	1281,60	0	0,00	0		0	0,00	13390,56
JUMLAH		**3213**	**25446,96**	**2174**	**15000,60**	**119**	**5355,00**	**441**	**555,66**	**12**	**56,16**	**550**	**8448,00**	**13660**	**9835,20**	**78**	**56,16**	**153**	**183,60**	**54**	**243,00**	**65180,34**

BAB VII
SOSIAL BUDAYA

7.1. RUANG LINGKUP

Pada pembahasan berikut ini akan membahas tentang keadaan sosial budaya, data yang dapat dilihat antara lain agama, demografi, kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan, kebudayaan nasional serta pemuda dan olahraga. Secara keseluruhan, lingkup penyajian data sosial budaya ini mencangkup:

1. Agama
    a. Data Jumlah Pemeluk Agama dan Sarana Ibadah
    b. Data Pondok Pesantren, Jamaah Haji dan Lembaga Pendidikan Keagamaan
    c. Data Penyuluh Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA)
2. Kesehatan
    a. Data Sarana Kesehatan
    b. Sarana Industri, Distributor Obat, Alat Kesehatan
    c. Kesehatan Masyarakat
    d. Data Tenaga Kesehatan
    e. Data Keluarga Bencana (KB) dan Kontrasepsi
3. Kesejahteraan Sosial
    a. Data Jumlah Penduduk Miskin, Keluarga Miskin dan Penduduk Rawan Sosial dan Sarana

b. Data Panti Asuhan dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (SKS)
c. Data Penduduk Miskin dan Beras Untuk Penduduk Miskin

4. Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Pemuda dan Olahraga
   a. Data Jumlah Sekolah
   b. Data Jumlah Siswa/Mahasiswa
   c. Data Jumlah Guru, dosen, Kepala Sekolah, Tamatan Pendidikan dan Jumlah Buta Huruf/Aksara
   d. Data Kabudayaan Nasional
   e. Data Pemuda dan Olah Raga

7.2. KONSEP DAN DEFINISI

Beberapa konsep dan difinisi yang terdapat dalam pemaparan data tentang sosial budaya yang ada dalam buku ini adalah sebagai berikut:

- Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1960 Pasal 2 yang dimaksud dengan kesehatan adalah yang meliputi kesehatan badan, rohani (mental) dan sosial, dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan.
- Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 yang dimaksud dengan Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhnya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu

mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

- Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 yang dimaksud dengan Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
- Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1).
- Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1).
- Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis

pendidikan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1).

- Kebudayaan nasional merupakan kebudayaan yang diakui sebagai identitas nasional. Pengertian kebudayaan nasional menurut TAP MPR No.II Tahun 1998, yaitu:
  "Kebudayaan nasional yang didasarkan Pancasila merupakan suatu perwujudan cipta, karya serta karsa bangsa Indonesia dan merupakan semua daya upaya seluruh rakyat Indonesia untuk dapat mengembangkan harkat serta martabat sebagai bangsa, dan diarahkan agar memberikan wawasan serta makna pada pembangunan nasional dalam segala bidang kehidupan bangsa.
- Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Pasal 1).
- Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan social (peraturan Menteri Sosial RI No:77/UHK/2010 Pedoman Dasar Karang Taruna).

- Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Pasal 1).
- Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan social (Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2005 Pasal 1).
- Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2005 Pasal 1).

7.3. AGAMA

Agama di Indonesia memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam ideologi bangsa Indonesia, Pancasila: “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sejumlah agama di Indonesia berpengaruh secara kolektif terhadap ekonomi dan budaya. Dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa "tiap-tiap penduduk diberikan kebebasan untuk memilih dan mempraktikkan kepercayaannya" dan "menjamin semuanya akan kebebasan untuk menyembah, menurut agama atau kepercayaannya".

Tabel: 7.3.1
Banyaknya Pemeluk Agama menurut Kecamatan di Kabupaten Natuna

Kecamatan	Islam	Protestan	Katholik	Hindu	Budha	Konghucu
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
Bunguran Timur	23,034	513	173	1	425	100
Bunguran Barat	7,203	94	4	-	255	1
Bunguran Utara	4,044	21	-	-	53	-
Bunguran Selatan	3,001	11	-	-	-	-
Bunguran Tengah	3,335	116	30	-	6	-
Bunguran Timur Laut	4,787	8	31	-	52	-
Bunguran Batubi	3,653	148	10	-	0	-
Midai	3,440	12	7	-	31	-
Suak Midai	1,656	3	-	-	6	-
Serasan	4,844	23	-	-	47	-
Serasan Timur	3,051	-	-	-	0	-
Subi	2,772	10	1	-	3	-
Pulau Tiga	3,253	6	7	-	23	3
Pulau Tiga Barat	1,877	3	-	-	6	-
Pulau Laut	2,147	-	1	-	12	1
Jumlah 2016	**72,097**	**969**	**266**	**1**	**915**	**105**
Jumlah 2015	71,130	939	249	1	931	104

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna Tahun 2017

Tabel: 7.3.2

Banyaknya Tempat Ibadah dan Jenis Tempat Ibadah menurut Kecamatan di Kabupaten Natuna

Kecamatan	Masjid	Langgar/ Mushala	Gereja	Vihara/ Klenteng	Pura
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Bunguran Timur	21	15	2	2	-
Bunguran Barat	13	8	1	1	-
Bunguran Utara	9	7	-	-	-
Bunguran Selatan	7	10	-	-	-
Bunguran Tengah	5	15	1	-	-
Bunguran Timur Laut	28	-	-	-	-
Bunguran Batubi	7	8	-	-	-
Midai	7	15	-	1	-
Suak Midai	2	1	-	-	-
Serasan	8	4	-	-	-
Serasan Timur	9	1	-	-	-
Subi	5	12	-	-	-
Pulau Tiga	11	6	-	-	-
Pulau Tiga Barat	-	-	-	-	-
Pulau Laut	2	3	-	-	-
Jumlah 2016	**134**	**105**	**4**	**4**	**-**
Jumlah 2015	133	106	4	4	-

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna Tahun 2017

Tabel: 7.3.3
Banyaknya Jemaah Haji menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Natuna

	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
	(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
01	Bunguran Timur	15	11	26
02	Bunguran Barat	-	5	5
03	Bunguran Utara	1	2	3
04	Bunguran Selatan	-	-	-
05	Bunguran Tengah	2	2	4
06	Bunguran Timur Laut	2	1	3
07	Bunguran Batubi	-	-	-
08	Midai	1	3	4
09	Suak Midai	-	-	-
10	Serasan	1	-	1
11	Serasan Timur	-	-	-
12	Subi	-	-	-
13	Pulau Tiga	-	1	1
14	Pulau Tiga Barat	-	-	-
15	Pulau Laut	-	-	-
	Jumlah 2016	**22**	**25**	**47**
	Jumlah 2015	18	21	39

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna Tahun 2017

7.4. KESEHATAN

Derajat kesehatan masyarakat suatu negara salah satunya dipengaruhi oleh keberadaan sarana kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Puskesmas adalah salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Pada era teknologi saat ini, Puskesmas juga dituntut untuk melakukan pelayanan masyarakat yang lebih cepat dan inovatif dengan menggunakan aplikasi yang bersifat online seperti SIMKES (Sistem Informasi Kesehatan) serta Manajemen Pendataan Keluarga.

Tabel: 7.4.1
Banyaknya Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Apotek menurut Kecamatan di Kabupaten Natuna

	Kecamatan	Rumah Sakit	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Apotek
	(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
01	Bunguran timur	1	1	1	5
02	Bunguran barat	-	1	4	-
03	Bunguran utara	-	1	9	-
04	Bunguran selatan	-	1	2	-
05	Bunguran tengah	-	1	3	-
06	Bunguran timur laut	-	1	4	-
07	Bunguran batubi	-	1	3	-
08	Midai	-	1	2	-
09	Suak midai	-	-	1	-
10	Serasan	-	1	-	-
11	Serasan timur	-	1	1	-
12	Subi	-	1	4	-
13	Pulau tiga	-	1	5	-
14	Pulau tiga barat	-	1	2	-
15	Pulau laut	-	1	2	-
	Jumlah 2016	**1**	**14**	**43**	**5**
	Jumlah 2015	1	13	34	5

Sumber: Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Natuna Tahun 2017

Tabel: 7.4.2
Banyaknya Tenaga Kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Natuna

	Kecamatan	Rumah Sakit	Puskesmas	Puskesmas Pembantu
	(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
I.	**Tenaga Medis**			
	Dokter spesialis	8	-	-
	Dokter umum	8	22	1
	Dokter gigi	2	8	1
	Perawat	114	213	24
	Bidan	45	137	5
	Farmasi	13	21	1
II.	**Tenaga Non Medis**			
	Ahli gizi	4	8	1
	Tehnisi medis	17	14	-
	Sanitasi	2	20	17
	Kesehatan masyarakat	3	24	11
	Jumlah 2016	**216**	**467**	**61**
	Jumlah 2015	190	435	61

Sumber: Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Natuna Tahun 2017

Tabel: 7.4.3
10 Jenis Penyakit Terbanyak di Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Natuna

	Jenis penyakit	Jumlah penderita
	(1)	*(2)*
01	Hipertensi	7.016
02	ISPA	4.304
03	Osteo Artritis	2.613
04	Dyspepsia	2.092
05	Gastritis	1.986
06	Nasofaringitis Akut	1.897
07	Dermatitis	1.566
08	Diabetes Melitus	1.271
09	Diare	1.254
10	Pulpitis	840
	Jumlah 2016	**24.839**

Sumber: Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Natuna Tahun 2017

7.5. PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sebuah hak atas pendidikan telah diakui oleh beberapa pemerintah. Pada tingkat global, Pasal 13 PBB 1966 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Meskipun pendidikan adalah wajib di sebagian besar tempat sampai usia tertentu, bentuk pendidikan dengan hadir di sekolah sering tidak dilakukan, dan sebagian kecil orang tua memilih untuk pendidikan home-schooling, e-learning atau yang serupa untuk anak-anak mereka. Pendidikan biasanya berawal saat seorang bayi itu dilahirkan dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan bisa saja berawal dari sebelum bayi lahir seperti yang dilakukan oleh banyak orang dengan memainkan musik dan membaca kepada bayi dalam kandungan dengan harapan ia bisa mengajar bayi mereka sebelum kelahiran

Tabel: 7.5.1
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Taman Kanak-Kanak (TK)
menurut Kecamatan dan Status di Kabupaten Natuna

Kecamatan	Sekolah		Guru		Murid	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
Bunguran timur	3	16	18	105	188	715
Bunguran barat	1	10	6	46	62	268
Bunguran utara	1	5	1	31	40	95
Bunguran selatan	1	3	1	18	34	54
Bunguran tengah	-	3	-	10	-	89
Bunguran timur laut	2	4	2	28	66	96
Bunguran batubi	-	-	-	-	-	-
Midai	1	1	2	11	71	24
Suak midai	-	-	-	-	-	-
Serasan	1	6	3	39	80	159
Serasan timur	1	4	2	27	52	90
Subi	1	3	2	26	43	76
Pulau tiga	1	9	3	44	26	172
Pulau tiga barat	-	-	-	-	-	-
Pulau laut	1	1	1	13	39	28
Jumlah 2016/2017	**14**	**65**	**41**	**398**	**701**	**1.866**
Jumlah 2015/2016	14	63	44	426	678	1.723

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Natuna tahun 2017

Tabel: 7.5.2
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Dasar (SD)
menurut Kecamatan dan Status di Kabupaten Natuna

Kecamatan	Sekolah		Guru		Murid	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
Bunguran timur	11	-	200	-	3.062	-
Bunguran barat	15	-	155	-	1.457	-
Bunguran utara	5	-	58	-	543	-
Bunguran selatan	6	-	57	-	433	-
Bunguran tengah	3	-	35	-	432	-
Bunguran timur laut	7	-	83	-	632	-
Bunguran batubi	-	-	-	-	-	-
Midai	6	-	77	-	589	-
Suak midai	-	-	-	-	-	-
Serasan	7	-	103	-	634	-
Serasan timur	3	-	43	-	362	-
Subi	5	-	49	-	360	-
Pulau tiga	7	-	81	-	732	-
Pulau tiga barat	-	-	-	-	-	-
Pulau laut	3	-	39	-	306	-
Jumlah 2016/2017	**78**	**-**	**980**	**-**	**9.542**	**-**
Jumlah 2015/2016	79	-	624	-	9.803	-

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Natuna tahun 2017

Tabel: 7.5.3
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) menurut Kecamatan dan Status di Kabupaten Natuna

Kecamatan	Sekolah		Guru		Murid	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
Bunguran timur	3	1	74	14	1.056	110
Bunguran barat	3	-	41	-	342	-
Bunguran utara	2	-	24	-	161	-
Bunguran selatan	1	-	14	-	121	-
Bunguran tengah	1	-	17	-	213	-
Bunguran timur laut	2	-	36	-	228	-
Bunguran batubi	-	-	-	-	-	-
Midai	1	-	15	-	207	-
Suak midai	-	-	-	-	-	-
Serasan	1	-	17	-	228	-
Serasan timur	1	-	14	-	171	-
Subi	2	-	26	-	146	-
Pulau tiga	2	-	18	-	193	-
Pulau tiga barat	-	-	-	-	-	-
Pulau laut	1	-	12	-	84	-
Jumlah 2016/2017	**20**	**1**	**308**	**14**	**3.150**	**110**
Jumlah 2015/2016	20	1	299	14	3.089	110

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Natuna Tahun 2017

Tabel: 7.5.4
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) menurut Kecamatan dan Status di Kabupaten Natuna

Kecamatan	Sekolah		Guru		Murid	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
Bunguran timur	2	-	85	-	1.011	-
Bunguran barat	2	-	36	-	200	-
Bunguran utara	1	-	18	-	151	-
Bunguran selatan	1	-	13	-	109	-
Bunguran tengah	1	-	19	-	126	-
Bunguran timur laut	1	-	19	-	147	-
Bunguran batubi	-	-	-	-	-	-
Midai	1	-	22	-	166	-
Suak midai	-	-	-	-	-	-
Serasan	1	-	23	-	245	-
Serasan timur	1	-	17	-	118	-
Subi	1	-	15	-	109	-
Pulau tiga	1	-	17	-	161	-
Pulau tiga barat	-	-	-	-	-	-
Pulau laut	1	-	20	-	101	-
Jumlah 2016/2017	**14**	**-**	**306**	**-**	**2.644**	**-**
Jumlah 2015/2016	14	-	290	-	2.654	-

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Natuna Tahun 2017

Tabel: 7.5.5
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menurut Kecamatan dan Status di Kabupaten Natuna

Kecamatan	Sekolah		Guru		Murid	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
Bunguran timur	1	3	41	24	163	97
Bunguran barat	2	-	43	-	199	-
Bunguran utara	-	-	-	-	-	-
Bunguran selatan	-	-	-	-	-	-
Bunguran tengah	-	-	-	-	-	-
Bunguran timur laut	-	-	-	-	-	-
Bunguran batubi	-	-	-	-	-	-
Midai	-	-	-	-	-	-
Suak midai	-	-	-	-	-	-
Serasan	-	-	-	-	-	-
Serasan timur	-	-	-	-	-	-
Subi	-	-	-	-	-	-
Pulau tiga	-	-	-	-	-	-
Pulau tiga barat	-	-	-	-	-	-
Pulau laut	-	-	-	-	-	-
Jumlah 2016/2017	**3**	**3**	**84**	**24**	**362**	**97**
Jumlah 2015/2016	3	3	82	32	315	137

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Natuna Tahun 2017

Tabel: 7.5.6
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Raudhatul Athfal (RA)
menurut Kecamatan dan Status di Kabupaten Natuna

Kecamatan	Sekolah		Guru		Murid	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
Bunguran timur	-	2	-	13	-	56
Bunguran barat	-	-	-	-	-	-
Bunguran utara	-	-	-	-	-	-
Bunguran selatan	-	-	-	-	-	-
Bunguran tengah	-	-	-	-	-	-
Bunguran timur laut	-	1	-	6	-	35
Bunguran batubi	-	-	-	-	-	-
Midai	-	-	-	-	-	-
Suak midai	-	-	-	-	-	-
Serasan	-	1	-	6	-	25
Serasan timur	-	2	-	11	-	90
Subi	-	-	-	-	-	-
Pulau tiga	-	-	-	-	-	-
Pulau tiga barat	-	-	-	-	-	-
Pulau laut	-	-	-	-	-	-
Jumlah 2016/2017	**-**	**6**	**-**	**36**	**-**	**206**
Jumlah 2015/2016	-	-	-	-	-	-

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna tahun 2017

Tabel: 7.5.7
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) menurut Kecamatan dan Status di Kabupaten Natuna

Kecamatan	Sekolah		Guru		Murid	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
Bunguran timur	-	1	-	16	-	416
Bunguran barat	-	-	-	-	-	-
Bunguran utara	-	-	-	-	-	-
Bunguran selatan	-	-	-	-	-	-
Bunguran tengah	-	-	-	-	-	-
Bunguran timur laut	-	-	-	-	-	-
Bunguran batubi	-	-	-	-	-	-
Midai	-	-	-	-	-	-
Suak midai	-	1	-	7	-	90
Serasan	-	-	-	-	-	-
Serasan timur	-	-	-	-	-	-
Subi	-	-	-	-	-	-
Pulau tiga	-	-	-	-	-	-
Pulau tiga barat	-	-	-	-	-	-
Pulau laut	-	-	-	-	-	-
Jumlah 2016/2017	**-**	**2**	**-**	**23**	**-**	**506**
Jumlah 2015/2016	-	2	-	16	-	392

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Natuna tahun 2017

Tabel: 7.5.8
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) menurut Kecamatan dan Status di Kabupaten Natuna

Kecamatan	Sekolah		Guru		Murid	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
Bunguran timur	1	-	18	-	287	-
Bunguran barat	1	3	15	32	267	170
Bunguran utara	-	1	-	9	-	42
Bunguran selatan	-	1	-	9	-	58
Bunguran tengah	-	1	-	8	-	10
Bunguran timur laut	-	1	-	9	-	62
Bunguran batubi	-	-	-	-	-	-
Midai	1	-	15	-	152	-
Suak midai	-	-	-	-	-	-
Serasan	-	1	-	12	-	86
Serasan timur	-	-	-	-	-	-
Subi	-	-	-	-	-	-
Pulau tiga	-	2	-	23	-	123
Pulau tiga barat	-	-	-	-	-	-
Pulau laut	-	1	-	10	-	60
Jumlah 2016/2017	**3**	**11**	**48**	**112**	**706**	**611**
Jumlah 2015/2016	3	11	46	116	704	583

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Natuna Tahun 2017

Tabel: 7.5.9
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Madrasah Aliyah (MA)
menurut Kecamatan dan Status di Kabupaten Natuna

Kecamatan	Sekolah		Guru		Murid	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
Bunguran timur	1	-	19	-	242	-
Bunguran barat	1	1	17	12	82	16
Bunguran utara	-	-	-	-	-	-
Bunguran selatan	-	-	-	-	-	-
Bunguran tengah	-	-	-	-	-	-
Bunguran timur laut	-	-	-	-	-	-
Bunguran batubi	-	-	-	-	-	-
Midai	-	1	-	16	-	97
Suak midai	-	-	-	-	-	-
Serasan	-	-	-	-	-	-
Serasan timur	-	-	-	-	-	-
Subi	-	-	-	-	-	-
Pulau tiga	-	1	-	9	-	34
Pulau tiga barat	-	-	-	-	-	-
Pulau laut	-	-	-	-	-	-
Jumlah 2016/2017	**2**	**3**	**36**	**37**	**324**	**147**
Jumlah 2015/2016	2	2	42	29	279	112

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna Tahun 2017

Tabel: 7.5.10
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Pondok Pesantren
menurut Kecamatan dan Status di Kabupaten Natuna

Kecamatan	Sekolah		Guru		Murid	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
Bunguran timur	-	1	-	16	-	156
Bunguran barat	-	1	-	17	-	53
Bunguran utara	-	-	-	-	-	-
Bunguran selatan	-	-	-	-	-	-
Bunguran tengah	-	-	-	-	-	-
Bunguran timur laut	-	-	-	-	-	-
Bunguran batubi	-	-	-	-	-	-
Midai	-	-	-	-	-	-
Suak midai	-	-	-	-	-	-
Serasan	-	-	-	-	-	-
Serasan timur	-	-	-	-	-	-
Subi	-	-	-	-	-	-
Pulau tiga	-	-	-	-	-	-
Pulau tiga barat	-	-	-	-	-	-
Pulau laut	-	-	-	-	-	-
Jumlah 2016/2017	**-**	**2**	**-**	**33**	**-**	**209**
Jumlah 2015/2016	-	-	-	-	-	-

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna Tahun 2017

Tabel: 7.5.11
Jumlah Dosen dan Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)
di Kabupaten Natuna

Uraian	Tahun	
	2015	2016
(1)	*(2)*	*(3)*
I. Jumlah dosen menurut tingkat pendidikan		
1. Diploma III	-	-
2. Sarjana S-1	30	30
3. Pasca Sarjana S-2	35	40
4. Magister S-3	1	1
II. Jumlah mahasiswa menurut program studi		
1. Pendidikan Agama Islam	283	199
2. Ekonomi Syariah	458	389
3. Hukum Pidana Islam (Jinayah)	86	108
4. Komunikasi Penyiaran Islam	8	36
5. Pendidikan Guru Raudhatul Athfal	26	49

Sumber: Sekolah Tinggi Agama Islam Kabupaten Natuna Tahun 2017

BAB VIII
INSIDENSIAL

8.1. RUANG LINGKUP

Data Insidensial yang disajikan dalam buku Pembidangan 8 Kelompok Data Penting Pembangunan Kabupaten Natuna akan diuraikan secara terperinci dengan kurun waktu masing-masing data sebagai berikut:

1. Data Bencana Alam pada tahun 2016
2. Data Kebakaran Hutan pada tahun 2016
3. Data Pencurian dan Penyelundupan Kayu pada tahun 2016
4. Data Pencurian Ikan pada tahun 2013 s/d 2016
5. Data Pengungsi pada tahun 2013 s/d 2016
6. Data Penyakit Menular pada tahun 2013 s/d 2016

8.2. KONSEP DAN DEFINISI

Sub bab ini berisi definisi dari terminologi yang digunakan dalam penyajian data Insidensial agar dapat memberikan interprestasi yang sama terhadap terminologi yang digunakan.

1. Secara umum, insidensial adalah kejadian yang menyebabkan kecelakaan, luka, kehilangan, kerugian finansial bagi para pekerja, pengunjung, pelajar, sukarelawan, dan lain sebagainya.

2. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, yang dimaksud dengan Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

3. Dalam Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2013 yang dimaksud dengan hutan adalah sesuatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan Kebakaran Hutan dan Lahan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.32/menlhk/Sejen/Kum.1/3/2016 adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi , sosial budaya dan politik.

4. Definisi ilegal logging menurut Tacconi (2006) adalah kegiatan ilegal yang berkaitan dengan ekosistem hutan yaitu pepohonan dan hewan, industri terkait hutan dan juga produk hutan kayu dan non kayu (Rahmi Hidayanti, 2006: 10). Sedangkan aktifitas ilegal logging adalah kegiatan menebang,

mengangkut, dan menjual kayu dengan melanggar ketentuan perundangan nasional dan atau internasional. Departemen Kehutanan menegaskan yang disebut illegal logging adalah tindak pidana penebangan pohon dengan aktifitasnya dengan mengacu pada UU No 41 Tahun 1999 dan PP No 34 Tahun 1999 yang meliputi kegiatan menebang atau memanen hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin yang berwenang, serta menerima, memberi atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat sahnya hasil hutan. Termasuk juga didalamnya kegiatan pemegang izin pemanfaatan yang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan, seperti melakukan penebangan melampaui target volume dan sebagainya.

5. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Sedangkan pencurian ikan (illegal fishing) adalah pencurian yang dilakukan karena menangkap ikan tanpa SIUP dan SIPI, menggunakan bahan peledak, bahan beracun, bahan berbahaya dan lainnya yang mengakibatkan kerusakan dan kepunahan sumber daya ikan.

6. Dalam Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penangulangan Bencana yang dimaksud dengan Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.

7. Penyakit menular dapat kita definisikan sebagai sebuah penyakit yang dapat ditularkan baik secara langsung maupun perantara. Penyakit menular ini ditandai dengan adanya agen atau penyebab penyakit yang hidup dan dapat berpindah serta menyerang penderita.Dalam ilmu kesehatan, penyakit menular merupakan sebuah penyakit yang disebabkan oleh sebuah agen biologi seperti virus, bakteria atau parasit, bukan disebabkan faktor fisik seperti halnya luka bakar ataupun kimia seperti halnya keracunan. Secara garis besar, Penyakit menular merupakan penyakit yang menyerang manusia dan bisa mengalami perpindahan penyakit ke manusia lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 yang dimaksud dengan Wabah penyakit Menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Maksud dan tujuan Undang-Undang ini adalah untuk melindungi penduduk dari malapetaka yang ditimbulkan wabah sedini mungkin, dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat.

8.3. BENCANA ALAM

Indonesia merupakan negara yang sangat rawan dengan bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir dan angin puting beliung.* Sekitar 13 persen gunung berapi dunia yang berada di kepulauan Indonesia berpotensi menimbulkan bencana alam dengan intensitas dan kekuatan yang berbeda-beda.

Salah satu pulau yang ada di kabupaten Natuna yang berpotensi tinggi terhadap Bencana Alam adalah Pulau Midai yang dimana beberapa lokasi di Pulau Midai terkena kerusakan lingkungan akibat abrasi pantai. Melalui Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbang) Natuna bekerja sama dengan Badan Geologi Bandung tahun 2011 melakukan pemetaan daerah rawan bencana di Kabupaten Natuna. Khususnya abrasi pantai di lokasi Suak Besar, kerusakan akibat abrasi sepanjang kurang lebih 500 m. Kedua, di lokasi pantai Kampung Sabang Muluk dan lokasi pantai yang berjarak satu kilometer ke arah timur termasuk Desa Air Kumpai. Kerusakan pantai sepanjang kurang lebih 200 m. Diketahui dari survey Baskesbang, bentuk Pulau Midai hampir persegi panjang, panjang pulau (berarah barat-timur) kurang lebih tujuh km dan lebarnya rata-rata empat km.

Secara morfologi pula, Pulau Midai merupakan pulau yang dibentuk oleh suatu tubuh gunung api, yaitu secara berangsur dari pedataran pantai yang relatif sempit hingga daerah perbukitan di bagian tengah pulau. Ketinggian daerah perbukitan berkisar dari beberapa puluh meter hingga 140 m.

Tabel: 8.3.1
Jumlah Kejadian Bencana dan Korban menurut Jenis di Kabupaten Natuna

Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Korban (jiwa)		
		Meninggal & Hilang	Luka-Luka	Menderita & Mengungsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Banjir	2	-	-	-
Kapal motor tenggelam	3	-	7	-
Tanah longsor	-	-	-	-
Puting beliung	1	-	-	-
Kebakaran hutan	110	-	-	-
Gelombang pasang/abrasi	10	-	-	-
Jumlah 2016	**126**	**-**	**7**	**-**
Jumlah 2015	60	-	10	-

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017

Tabel: 8.3.2
Jumlah Kejadian Bencana dan Dampaknya menurut Jenis di Kabupaten Natuna

Jenis Bencana	Kerusakan (unit)						
	Rumah				Fasilitas		
	Rusak berat	Rusak sedang	Rusak ringan	Terendam	Kesehatan	Peribadatan	Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Banjir	-	-	-	-	-	-	-
Kapal motor tenggelam	-	-	-	-	-	-	-
Tanah longsor	-	-	-	-	-	-	-
Puting beliung	-	2	-	-	-	-	-
Kebakaran hutan	-	-	-	-	-	-	-
Gelombang pasang/abrasi	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah 2016	**-**	**2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Jumlah 2015	-	48	-	-	-	-	-

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017

Tabel: 8.3.3
Jumlah Kejadian Bencana menurut Kecamatan dan Jenis di Kabupaten Natuna

Kecamatan	Jenis bencana					
	Banjir	Kapal tenggelam	Tanah longsor	Puting beliung	Kebakaran hutan	Gelombang pasang/ abrasi
Bunguran Timur	1	-	-	-	-	-
Bunguran Barat	-	-	-	-	-	-
Bunguran Utara	-	1	-	-	-	-
Bunguran Selatan	-	-	-	-	-	-
Bunguran Tengah	-	-	-	-	-	-
Bunguran Timur Laut	-	-	-	-	-	-
Bunguran Batubi	-	-	-	-	-	-
Midai	-	-	-	1	-	-
Suak Midai	-	-	-	-	-	-
Serasan	-	1	-	-	-	-
Serasan Timur	-	-	-	-	-	-
Subi	-	1	-	-	-	-
Pulau Tiga	-	-	-	-	-	-
Pulau Tiga Barat	-	-	-	-	-	-
Pulau Laut	-	-	-	-	-	-
Jumlah 2016	**1**	**3**	**-**	**1**	**-**	**-**
Jumlah 2015	-	6	-	-	-	1

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017

8.4. KEBAKARAN HUTAN

Di masa lalu membakar hutan merupakan suatu metode praktis untuk membuka lahan. Pada awalnya banyak dipraktekkan oleh para peladang tradisional atau peladang berpindah. Namun karena biayanya murah praktek membakar hutan banyak diadopsi oleh perusahaan-perusahaan kehutanan dan perkebunan. Di lingkup ilmu kehutanan ada sedikit perbedaan antara istilah kebakaran hutan dan pembakaran hutan. Pembakaran identik dengan kejadian yang disengaja pada satu lokasi dan luasan yang telah ditentukan. Gunanya untuk membuka lahan, meremajakan hutan atau mengendalikan hama. Sedangkan kebakaran hutan lebih pada kejadian yang tidak disengaja dan tak terkendali. Pada prakteknya proses pembakaran bisa menjadi tidak terkendali dan memicu kebakaran.

Pada tahun 2016 Kebakaran hutan dan lahan di Natuna terus meluas, bahkan sudah merembet ke hutan lindung di Kecamatan Bunguran Selatan, titik api sangat banyak, yang sudah menjangkau hutan di Binjai, Kecamatan Bunguran Barat dan hutan Kelarik di Kecamatan Bunguran Utara.Hambatan dalam pemadaman api adalah lahan gambut membuat medan sangat sulit. Mobil pemadam yang dikerahkan hanya bisa menjangkau sekitar area kebakaran asap sangat pekat, jarak pandang hanya 5 sampai 10 meter.

8.5. PENCURIAN DAN PENYELUNDUPAN KAYU

Pencurian menurut penjelasan Pasal 363 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

a) Perbuatan Mengambil, yaitu mengambil untuk disukai.
b) Suatu barang, dalam hal ini barang berupa kayu yang pada waktu diambil tidak berada dalam penguasaan pelaku.
c) Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dalam hal ini hutan dapat merupakan hutan adat dan hutan hak yang termasuk dalam hutan negara maupun hutan negara yang tidak dibebani hak.
d) Dengan sengaja atau maksud ingin memiliki dengan melawan hukum. Jelas bahwa kegiatan penebangan kayu dilakukan dengan sengaja dan tujuan dari kegiatan itu adalah untuk mengambil manfaat dari hasil hutan berupa kayu tersebut. Akan tetapi ada ketentuan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam pemanfaatan hasil hutan berupa kayu sehingga kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan itu yang bertentangan dengan ketentuan itu yang melawan hukum. Artinya menebang kayu didalam area hutan yang bukan menjadi haknya menurut hukum.

Penyelundupan kayu hingga saat ini belum ada peraturan yang mengatur, bahkan dalam KUHP yang merupakan ketentuan umum terhadap tindak pidana pun belum mengatur penyelundupan kayu. Selama ini penyelundupan sering hanya dipersamakan dengan delik pencurian oleh karena memiliki persamaan unsur yaitu tanpa hak mengambil barang milik orang lain. Berdasarkan pemahaman tersebut kegiatan penyelundupan kayu (peredaran kayu secara ilegal menjadi bagian dari kejahatan ilegal logging dan merupakan perbuatan yang dapat dipidana. Namun demikian pasal 50 ayat (3) huruf f dan h undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 yang mengatur tentang membeli, menjual dan atau mengangkut hasil hutan yang dipungut secara tidak sah dapat diinterpretasikan sebagai suatu perbuatan penyelundupan kayu.

8.6. PENCURIAN IKAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melakukan moratorium kapal eks. Asing. Dalam hal ini, KKP sekaligus penggerak dalam memberantas kapal-kapal asing, telah membentuk satgas pemberantasan illegal fishing. Di perairan Natuna, banyak kapal asing melakukan pencurian ikan, mulai dari negara- Negara Cina, Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan bahkan kapal-kapal yang memang sudah menjadi buronan Interpol. Ribuan ton ikan ditangkap secara *illegal*, Indonesia merugi triliunan rupiah, hingga rusaknya ekosistem laut menjadi deretan permasalahan yang terjadi di Perairan Natuna.

Tabel: 8.6.1
Jumlah Kasus Pencurian Ikan di Perairan Kabupaten Natuna

	Nama	Tahun		Satuan
		2015	2016	
	(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
I.	Jumlah kasus pencurian ikan	3	41	Kasus
II.	Jumlah kapal pencuri ikan yang disita	3	30	Buah
III.	Jumlah lokasi pencurian ikan	3	31	Lokasi
	Jumlah	**3**	**41**	

Sumber: Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kabupaten Natuna Tahun 2017

8.7. PENYAKIT MENULAR

Penularan dari penyakit ini biasanya terjadi bila terjadi kontak antara orang yang sakit dengan orang lain. Bisa juga terjadi secara langsung maupun melalui perantara. Biasanya sifat dari penyakit menular adalah akut, berdurasi pendek, dan biasanya disebabkan oleh patogen.

Tabel: 8.7.1
Jumlah Kasus Penyakit Menular di Kabupaten Natuna

Nama		Tahun	
		2015	2016
I.	**Jumlah kasus wabah/endemi pada manusia**		
1.	Sapi gila	-	-
2.	Flu burung	-	-
3.	Chikungunya	-	-
4.	Demam berdarah	152	-
5.	Hepatitis	-	-
6.	Kolera	-	-
7.	Malaria	5	-
8.	Meningitis	-	-
9.	Tuberkolosis	30	32
10.	AIDS	4	2
11.	HIV	11	18
12.	Difteri	-	-
13.	Rabies	-	-
II.	**Jumlah kasus wabah/endemi pada hewan**		
1.	Sapi gila	-	-
2.	Flu burung	-	-
3.	Flu babi	-	-
4.	Anjing gila	-	-
	Jumlah	**175**	**24**

Sumber : Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Natuna Tahun 2017

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng Komplek Natuna Gerbang Utaraku
www.diskominfo.natunakab.go.id E-mail: diskominfo@natunakab.go.id
Telp/WA/SMS : 0821-6944-1216